



LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA



LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar.....	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Gambaran Umum.....	5
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis Organisasi.....	10
E. Peran Strategis Organisasi.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Visi Dan Misi	11
B. Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah	11
C. Tujuan Strategis	12
D. Perjanjian Kinerja Awal Dan Akhir	12
E. Program Prioritas.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Sekretariat Bpp Bahasa.....	15
B. Realisasi Anggaran	67
INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING COLLABORATIVE	72
Inovasi	72
Penghargaan	77
Program Crosscutting/Collaborative	78
BAB IV PENUTUP	83

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Gedung BPP Bahasa.....	5
Gambar 2. Sandingan Perubahan Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022.....	18
Gambar 3. Perubahan Nomenklatur IKK Tahun 2021 dan 2022.....	18
Gambar 4. Dokumentasi Penilaian Akhir SAKIP dengan Tim Inspektorat Jenderal	23
Gambar 5. Penyusunan Lakin Eselon II di Hotel Mercure Cikini, bulan November.....	25
Gambar 6. Linimasa Reviu dan Evaluasi Renstra	25
Gambar 7. Sinkronisasi dan koordinasi capaian indikator BPP Bahasa Semester I.....	26
Gambar 8. Dokumentasi Pendampingan SAKIP dengan Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek.	26
Gambar 9. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan SAKIP di balai dan kantor.....	27
Gambar 10. Linimasa Tahapan Pendampingan SAKIP Tahun 2022.....	27
Gambar 11.. Proses Pendampingan Monitoring P dan A Balai dan Kantor	27
Gambar 12. Linimasa Pelaksanaan Manajemen Risiko	28
Gambar 13. Dokumentasi pendampingan NKA melalui daring.....	28
Gambar 14.. Linimasa Pelaksanaan Kegiatan di Layanan EPPA.....	29
Gambar 15. Rapat Kerja II tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung dihadiri oleh seluruh kepala satker di lingkungan BPP Bahasa.....	30
Gambar 16. Hasil Pre dan Post Test dalam Raker	30
Gambar 17. Rancangan Banpem BPP Bahasa.....	31
Gambar 18. Rancangan Banpem BPP Bahasa.....	31
Gambar 19. Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2023	32
Gambar 20.. Kategori Kepemilikan Tanah dan Gedung di BPP Bahasa	34
Gambar 21. Linimasa Layanan BMN	35
Gambar 22. Pembukaan Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris BPP Bahasa	35
Gambar 23. Kegiatan pembukaan kegiatan Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT tahap I dan tahap II.	36
Gambar 24. Kegiatan koordinasi pengadaan BMN UPT.	37
Gambar 25. Linimasa Layanan APK.....	38
Gambar 26. kegiatan rekonsiliasi data SAI, 15 –18 November 2022.....	38
Gambar 27. kegiatan penyusunan laporan keuangan.....	39
Gambar 28. Tindak Lanjut Hasil Audit dan Pendampingan Pelaporan Keuangan, Balai Bahasa Sulawesi Utara dan Kantor Bahasa Gorontalo	40
Gambar 29. Harmonisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian.....	43
Gambar 30. Linimasa jabatan fungsional widyabasa.	45
Gambar 31. Kegiatan Prioritas di Layanan Kepegawaian	46
Gambar 32. Peta Kerja Sama Tahun 2021.....	48

Gambar 33. Peta Kerja Sama BPP Bahasa Tahun 2022	48
Gambar 34. Linimasa Pengembangan Sistem Informasi	49
Gambar 35. Linimasa Pelaksanaan Kegiatan Layanan Datin.....	50
Gambar 36. Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi.....	50
Gambar 37. Laman BPPB Bahasa, GESIT, dan PASTI	50
Gambar 38. Laman Kongres Bahasa Indonesia XII bisa diakses secara daring di alamat kbi.kemdikbud.go.id.....	51
Gambar 39. Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan dalam Rangka Pengelolaan Data dan Informasi, Hotel Ciputra, Jakarta Barat.....	51
Gambar 40. Perubahan Nomenklatur indikator Tahun 2021 dan 2022.....	53
Gambar 41. Tim RBI Badan Bahasa Tahun 2022	55
Gambar 42. Pendampingan Tim RBI ke BBP Bali.....	56
Gambar 43. Mekanisme Penilaian ZI-WBK/WBBM Satker Tahun 2022.....	56
Gambar 44. Pendampingan Pengelolaan Keuangan di KBP NTT dan BBP Papua.....	58
Gambar 45. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan.....	59
Gambar 46. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.....	59
Gambar 47. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meresmikan Unit Layanan Terpadu didampingi oleh Pejabat Badan Bahasa.....	61
Gambar 48. Kegiatan jumpa sapa Mendikbudristek dengan seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat dan Pusbin, tanggal 23 November 2023.....	62
Gambar 49. Kegiatan Koordinasi Ketatausahaan dalam rangka layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	62
Gambar 50. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Sekretariat Badan tahun 2022	62
Gambar 51. Pemusnahan Arsip di Aspex Kumbong, Cileungsi.....	63
Gambar 52. Ruang Kontrol CCTV dan Keamanan di BPP Bahasa.....	63
Gambar 53. Ruang Ramah Anak.....	63
Gambar 54. Ruang Siniar BPP Bahasa.	63
Gambar 56. Pemberian Petunjuk Arah.....	64
Gambar 58. Pengecatan Lahan Parkir.....	64
Gambar 57. Pemasangan Pintu Tempat Wudu Musala.....	64
Gambar 59. Pengecatan Jalan ke Musala	64
Gambar 55. Unit Layanan Terpadu yang dikelola oleh Sekretariat BPP Bahasa.....	64
Gambar 60. Pengecatan Kanstin dan Pemasangan ACP.....	65
Gambar 61. Perpustakaan BPP Bahasa	65
Gambar 62. Koleksi Perpustakaan BPP Bahasa	65
Gambar 63. Sambutan Kepala dan Sekretariat BPP Bahasa pada acara Bedah Buku	66
Gambar 64. Laman Gesit dapat diakses melalui alamat gesit.kemdikbud.go.id.	72
Gambar 66. Buku Data Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2022.....	74
Gambar 65. Laman Aplikasi Padanan Istilah (PASTI)	74
Gambar 67. Foto Penyerahan Penghargaan IDEAS Tahun 2022.....	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022.....	1
Grafik 2. Nilai SAKIP Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020, 2021 dan 2022.....	19
Grafik 4. Sandingan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra tahun 2024	20
Grafik 3. Capaian IKK Persentase Satker di BPP Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB	20
Grafik 5. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPP Bahasa Tahun 2022.....	22
Grafik 6. Informasi Kepemilikan Prasarana Balai dan Kantor Tahun 2022.....	34
Grafik 7. Penyelesaian Temuan Itjen Kemendikbudristek tahun 2018-2022	40
Grafik 8. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2022.....	41
Grafik 9. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022	54
Grafik 10. Grafik Sandingan Target dan Capaian Akumulasi sampai dengan Tahun 2024.	54
Grafik 11. Pengunjung Perpustakaan sejak tahun 2020 sampai tahun 2022.....	66
Grafik 12. Daya serap Anggaran tahun 2022	68
Grafik 13. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022	68
Grafik 14. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022	70
Grafik 15. Realisasi anggaran per belanja Tahun 2021 dan 2022.....	70
Grafik 16. Jumlah pengikut akun sosial media Badan Bahasa Tahun 2021 dan 2022	80
Grafik 17. Konten Media Sosial BPP Bahasa Tahun 2022.....	81
Grafik 18. Jumlah pengunjung majalah Jentera dan Ranah tahun 2021 dan 2022	82
Grafik 19. Grafik Capaian IKK Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022	83
Grafik 20. Daya serap Anggaran tahun 2022	84
Grafik 21. Realisasi Anggaran per IKK Tahun 2022	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB.....	19
Tabel 2. Tabel Sandingan Capaian dan Target Akumulasi IKK sampai dengan Tahun 2024.....	20
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Satker Berdasarkan Predikat di lingkungan BPP Bahasa Tahun 2021 dan 2022.....	21
Tabel 4. Tabel Capaian IKK Jumlah Satker di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM Tahun 2022.....	53
Tabel 5. Tabel Sandingan Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	54
Tabel 6. Penyerapan Anggaran Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa Per Indikator Kinerja Kegiatan.....	68
Tabel 7. Penyerapan Anggaran Per Subkomponen Kegiatan Tahun 2022.....	69
Tabel 8. Hasil Optimalisasi Kegiatan Per Subkomponen Tahun 2022.....	71

“Mengukuhkan Makna Bermartabat-Bermanfaat”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2022 menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2022.



Jakarta, 24 Januari 2023

Sekretaris BPP Bahasa,

Hafidz Muksin

NIP 197001211990011001

SEKRETARIAT **HEBAT**

"Harmonis, Energik, Bermutu, Akuntabel, Transparan"

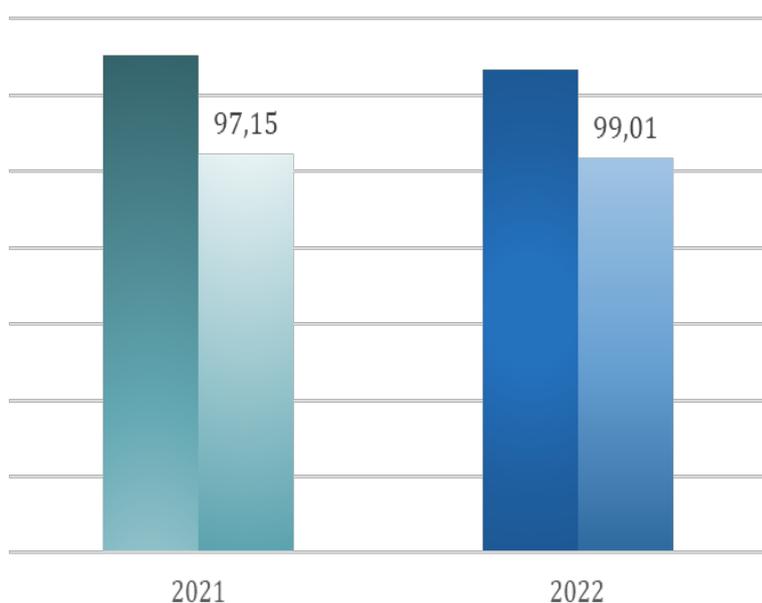
Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan dengan dua indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja ini.

Sasaran kegiatan di Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022 adalah Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki dua indikator kinerja, yaitu (1) Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dengan target 75,75%, dan (2) Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM dengan 5 satker.



Grafik 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

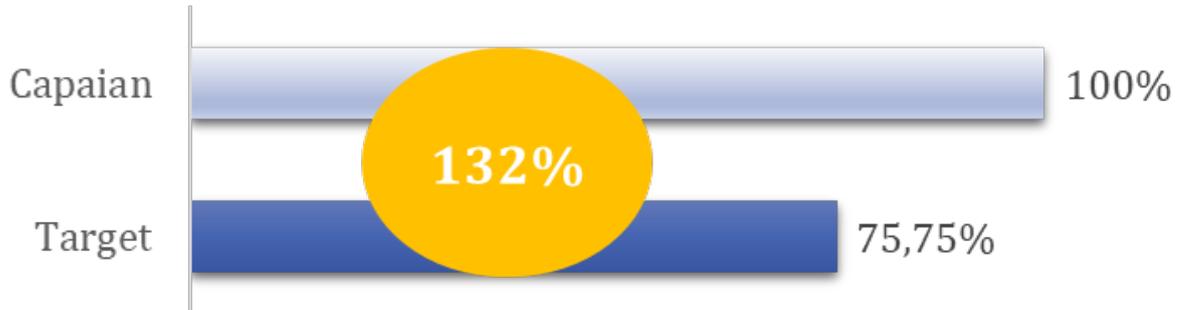
Realisasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, dari total pagu anggaran tahun pada 2021 sebesar Rp 130.244.472.000,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), anggaran dapat terealisasi sebesar Rp126.528.268.096,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 97,15%. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar

Rp103.492.522.874,00 atau sebesar 99,01% dari total pagu sebesar Rp104.522.809.000,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar 1,87% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



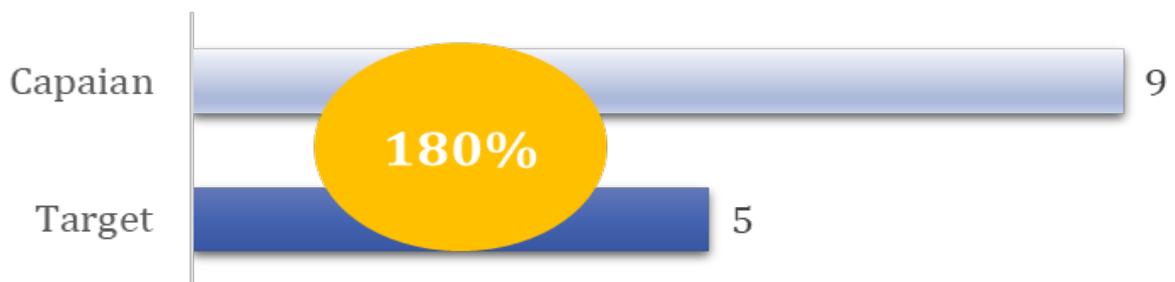
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB



Hasil penilaian akhir Inspektorat Jenderal terhadap akuntabilitas kinerja satker di lingkungan BPP Bahasa dengan target 75,75% predikat minimal BB atau sebanyak 26 satker, tercapai sebanyak 33 satker atau 100% dengan predikat A.

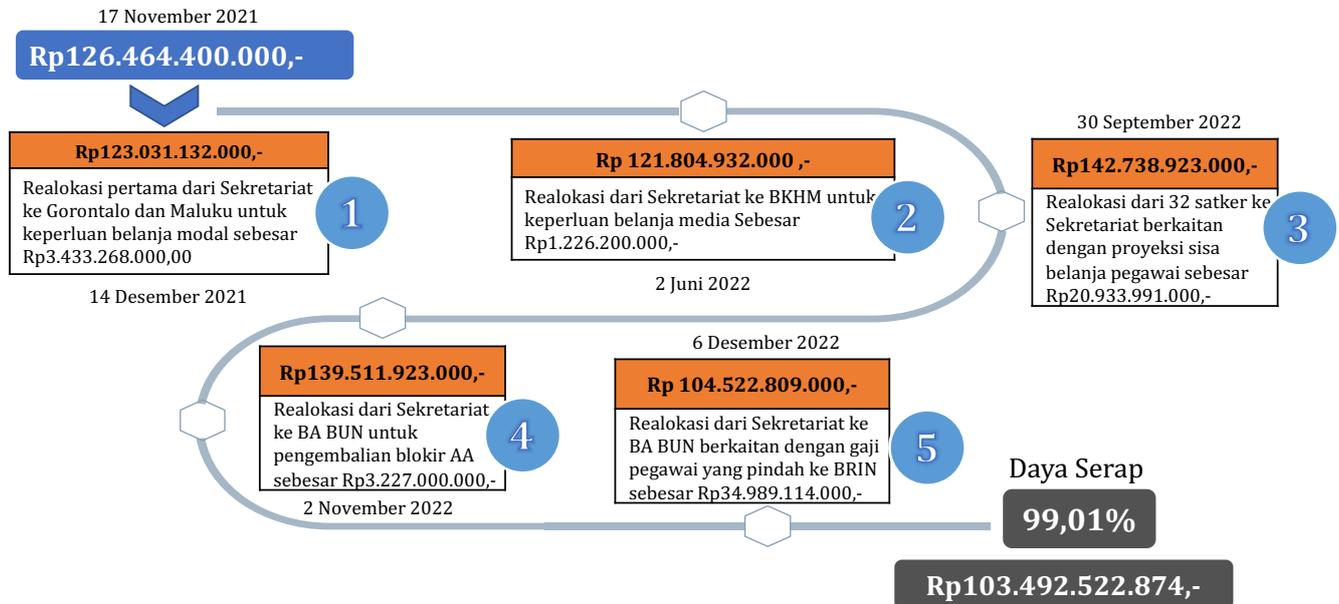
2. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM



Satker di lingkungan BPP Bahasa yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2022 adalah sebanyak sembilan satker (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat) atau 180%, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp124.464.400.000,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Jumlah anggaran tersebut didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat BPP Bahasa.

Pada perjalanannya, anggaran Sekretariat BPP Bahasa mengalami lima kali perubahan jumlah pagu anggaran, dengan penjelasan singkat sebagai berikut.



Sehingga total pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa per 6 Desember tahun 2022 sebesar Rp104.522.809.000,00. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022, Sekretariat BPP Bahasa dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp103.492.522.874,00 atau 99,01%.

Beberapa kendala yang dialami dan strategi yang dilakukan Sekretariat BPP Bahasa dalam mencapai target kinerja tahun 2022, serta langkah antisipasi yang akan dilakukan di tahun 2023, sebagai berikut.



Kendala

1. Perbedaan persepsi dan standar terkait pemenuhan data dukung penilaian SAKIP berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
2. Komitmen pimpinan satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melakukan perubahan pandangan, dan sekaligus sebagai agen perubahan masih rendah.

Strategi

1. Koordinasi dengan mitra kerja terkait secara terus menerus dan berkesinambungan
2. Pendampingan dan bimbingan teknis pada tim SAKIP.
3. Evaluasi secara rutin dan terpadu dengan seluruh satker.



Langkah Antisipasi

1. Mengusulkan pedoman teknis terkait pemenuhan data dukung SAKIP berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Permedikbudristek Nomor 40 Tahun 2022.
2. Menyusun pedoman teknis terkait pemenuhan data dukung ZI-WBK/WBBM
3. Menyusun pemetaan satker yang memiliki potensi untuk diusulkan menjadi satker ZI-WBK/WBBM.
4. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM dan fasilitasi sarana yang menunjang ZI-WBK/WBBM.
5. Pedoman standar minimal fasilitas layanan sarana dan prasarana satker.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



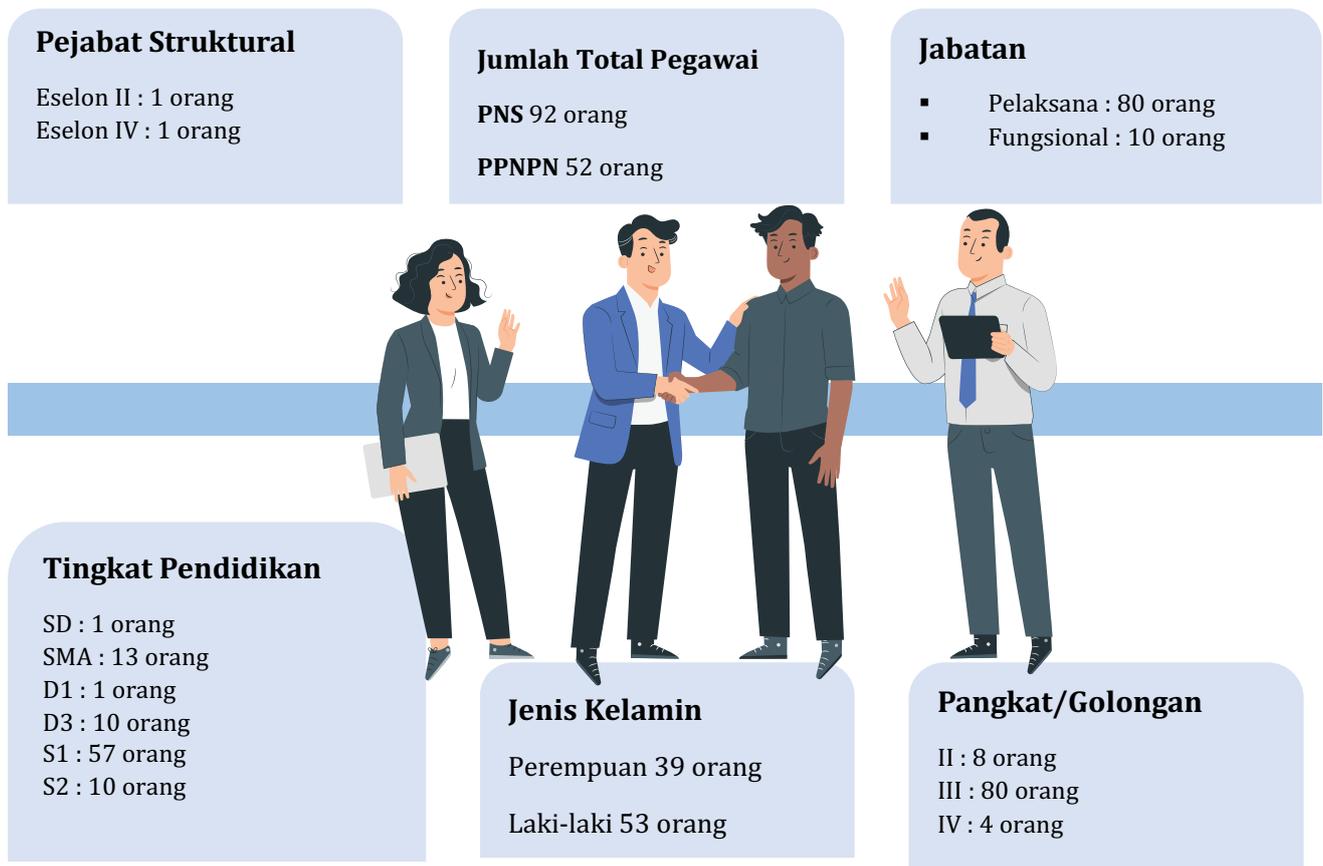
Gambar 1. Gambar Gedung BPP Bahasa

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Sekretariat BPP Bahasa) dalam melaksanakan program dan perencanaan strategis tahun 2020—2024 merupakan penggerak utama tata kelola kelembagaan, berperan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPP Bahasa. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diperlukan serangkaian upaya terpadu, sistematis, dan komprehensif demi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yaitu meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang progresif, perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, pelayanan publik yang baik, pelaksanaan kebijakan bahasa dan sastra melalui fungsi kehumasan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan upaya terpadu tersebut, Sekretariat BPP Bahasa berupaya membangun sistem kerja dan iklim organisasi yang **Harmonis, Energik, Bermutu, Akuntabel dan Transparan (HEBAT)**, agar dapat menjalankan reformasi birokrasi tersebut.

Sekretariat BPP Bahasa berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, seiring dengan pergantian nama Pusat Bahasa menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Sekretariat BPP Bahasa merupakan salah satu satker eselon II di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dipimpin oleh Sekretaris BPP Bahasa Hafidz Muksin. Sekretariat BPP Bahasa terbentuk pada tahun 2010 setelah disahkannya Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan peraturan ini, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, unit utama (eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wilayah kerja Sekretariat Badan BPP Bahasa melingkupi seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa yang ada di setiap provinsi di Indonesia yang terdiri dari tiga pusat yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta UPT yang tersebar di 30 provinsi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Hal ini sesuai dengan tugas Sekretariat BPP Bahasa adalah melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL, TINGKAT PENDIDIKAN, PANGKAT/GOLONGAN, DAN JENIS KELAMIN



B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang OTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024.

C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

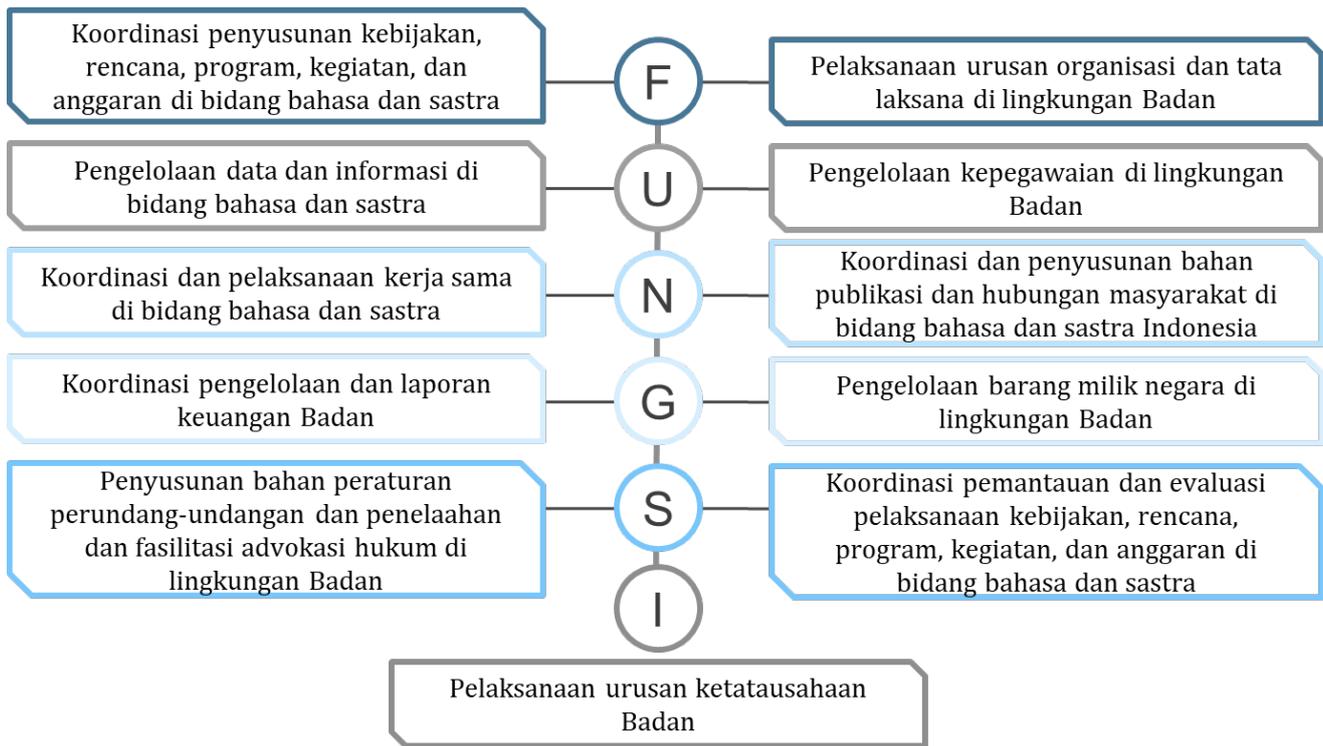
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2021



TUGAS

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

FUNGSI



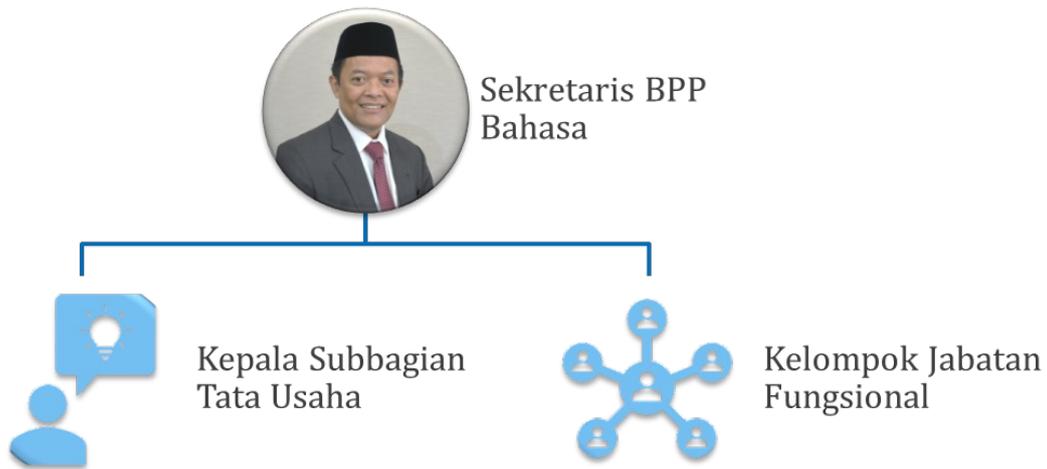
STRUKTUR ORGANISASI

Secara organisasi, Sekretariat BPP Bahasa dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat BPP Bahasa terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan perencanaan, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, kerja sama dan hubungan masyarakat, data dan informasi, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Sekretariat BPP Bahasa.

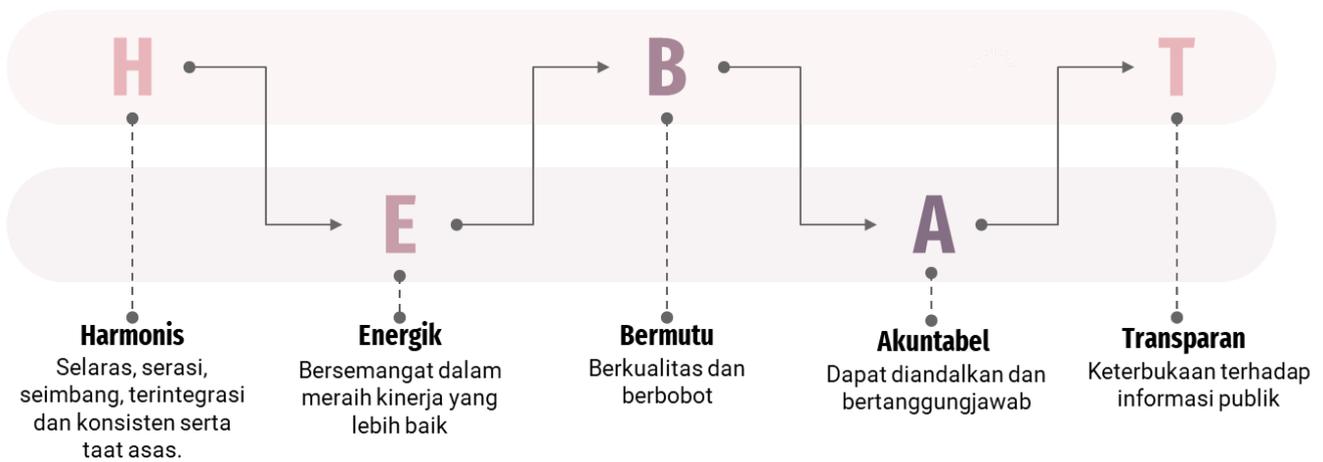
Untuk mengharmonisasi dan memudahkan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat BPP Bahasa membentuk dua koordinator layanan di bawah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Koordinator yang dibentuk, yaitu.

1. Koordinator urusan perbendaharaan, BMN, akuntansi dan pelaporan keuangan, hukum, tata Laksana, RBI, dan kepegawaian.
2. Koordinator urusan umum, sarana dan prasarana, pengadaan, perencanaan, evaluasi, humas, publikasi, kerja sama, dan sistem informasi.

Berikut struktur organisasi yang ada di Sekretariat BPP Bahasa.



Sesuai dengan moto “Sekretariat Hebat” Sekretariat BPP Bahasa terus melakukan upaya perbaikan kinerja dengan terus melakukan peningkatan kualitas tatakelola kelembagaan meliputi peningkatan seluruh layanan di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa.



D. Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat BPP Bahasa, maka isu strategis yang harus diantisipasi dalam peningkatan kinerja di masa depan adalah:

1. peningkatan pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan BPP Bahasa; dan
2. penguatan pembangunan budaya zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di seluruh lingkungan BPP Bahasa.

E. Peran Strategis Organisasi

Dalam upaya mendukung transformasi yang sedang berlangsung di BPP Bahasa, dan mengukuhkan moto Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat, agar hasil kinerja BPP Bahasa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka peran strategis Sekretariat BPP Bahasa adalah:

1. peningkatan kompetensi pegawai baik teknis maupun administratif berdasarkan identifikasi kelompok kepakaran dan layanan profesional;
2. penguatan komitmen dan konsistensi pimpinan satuan kerja dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
3. peningkatan publikasi produk-produk dan layanan kebahasaan serta kisah sukses yang dihasilkan BPP Bahasa agar diketahui dan dimanfaatkan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Dan Misi

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020—2024, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan visi dan misi yang mengacu pada BPP Bahasa yang diturunkan dari visi dan misi Presiden, sebagai berikut.



VISI

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

MISI

Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



B. Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020—2024, Sekretariat BPP Bahasa menetapkan sasaran, indikator dan target tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.

SK	IKK	Target		Realisasi		Target 2024
		2020	2021	2020	2021	
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	5	-	6	-	2
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	-	2	1	-	2
	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 91	-	92	-	92,22	95

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Satuan	Target Tahun		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,70	%	75,75	78,8	81,8
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	5	Satker	5	5	5

C. Tujuan Strategis

Sekretariat BPP Bahasa memiliki tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai berikut.

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Satuan	Target tahun 2024
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	Satker	4

D. Perjanjian Kinerja Awal Dan Akhir

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat BPP Bahasa merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

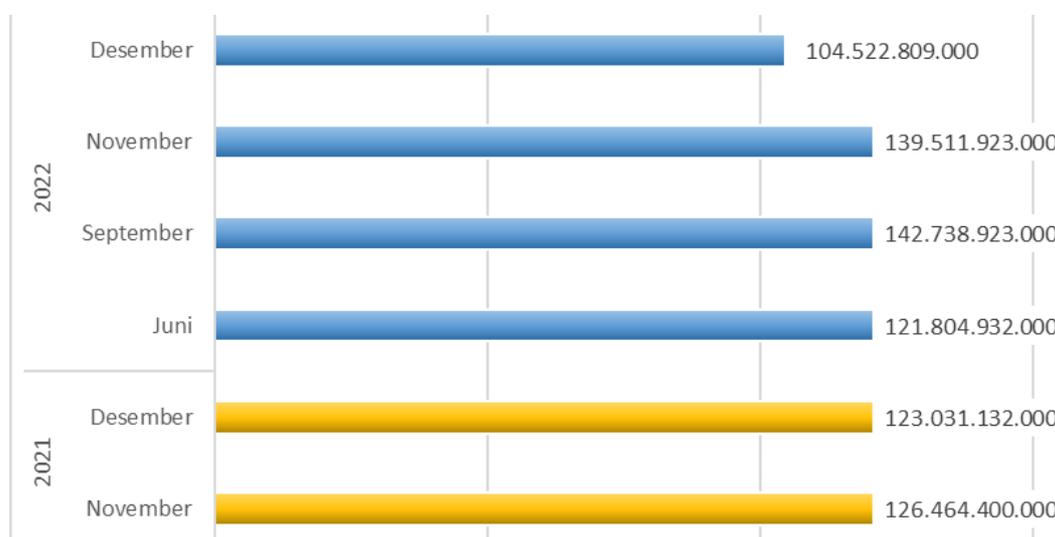
Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	75,75
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	126.464.359.000

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sebanyak tiga kali, yaitu pengalihan belanja media dari Sekretariat BPP Bahasa ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), belanja pegawai yang berstatus *automatic adjustment* (AA) dari Sekretariat BPP Bahasa dikembalikan ke BA BUN, dan pengalihan belanja pegawai sebagai akibat dari mutasi pegawai BPP Bahasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Serta 2 kali realokasi belanja modal dari Sekretariat ke kantor Bahasa Gorontalo dan Maluku, dan realokasi belanja pegawai dari 32 satker di lingkungan BPP Bahasa ke Sekretariat BPP Bahasa.

Berikut grafik perubahan pagu anggaran di Sekretariat Badan sepanjang tahun 2022.



Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	75,75
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	104.522.809.000

E. Program Prioritas

Program prioritas yang diusung tahun 2022 berdasarkan arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu (1) Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, (2) Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan (3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Ketiga fokus kebijakan tersebut didukung Sekretariat BPP Bahasa melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun output di Sekretariat BPP Bahasa secara spesifik tidak ada yang tertagging sebagai prioritas nasional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat BPP Bahasa

Pengukuran kinerja Sekretariat BPP Bahasa disusun dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Sekretariat BPP Bahasa melakukan klarifikasi atas hasil dan manfaat program dan kegiatan yang dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel. Selain itu, hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga yang menjalankan tugas fungsi sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja Sekretariat BPP Bahasa dilakukan secara periodik dalam satu tahun anggaran, yaitu dengan menyandingkan target dan capaian kegiatan untuk diukur capaian kinerja kegiatan dan capaian kinerja anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja 156%. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPP Bahasa, ditetapkan satu sasaran kegiatan dan dua indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaian dua indikator kegiatan selama tahun 2022, yaitu.



**Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja
di Lingkungan Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2020—2024 (SEBELUM REVISI)

SK	IKK	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2	-
	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 91	92	92,22

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA REVISI TAHUN 2022—2024

SK	IKK	Angka Dasar	Target 2022	Capaian	%	Target 2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa	Jumlah Satker di BPP Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	5	5	9	180	5
	Persentase satker di BPP Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (%)	69,70	75,75	100	132,01	81,80

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Sekretariat BPP Bahasa perlu menerapkan prinsip dasar tersebut agar peningkatan tata kelola di setiap satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dapat meningkat kualitasnya. Sebagai wujud upaya mewujudkan tata kelola yang baik, Sekretariat BPP Bahasa menetapkan indikator kinerja Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP minimal, dan Jumlah Satker yang di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM pada Rencana Strategis 2020—2024.

Indikator tersebut menjadi alat ukur keberhasilan peningkatan tata kelola yaitu dengan melakukan peningkatan akuntabilitas satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat BPP Bahasa merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini merupakan integrasi dari

sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan ZI-WBK/WBBM atau pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola manajemen yang baik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai panutan (*role model*) Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan karena untuk memudahkan penghitungan capaian indikator. Hal tersebut yang menyebabkan target dan capaian tahun 2021 tidak bisa disandingkan dengan target dan capaian tahun 2022 setelah Revisi Renstra tahun 2022—2024.

Untuk melihat penjelasan yang lebih rinci mengenai pencapaian target setiap indikator kinerja, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.



1

Persentase Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

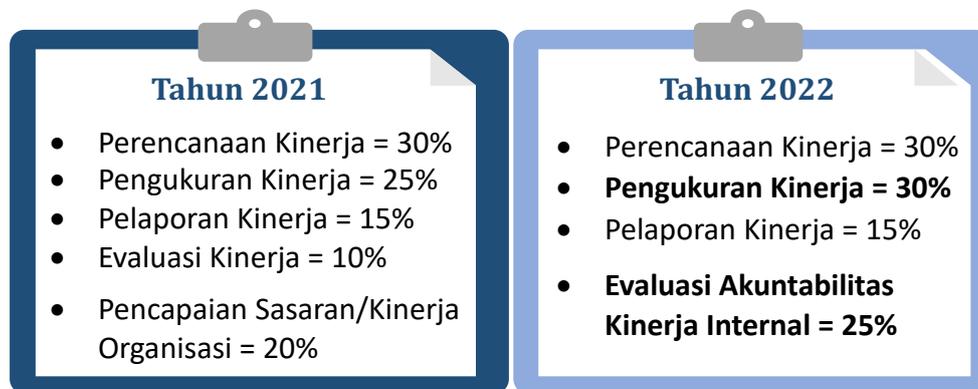
Salah satu target indikator kinerja yang mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, adalah 75,5%. Berdasarkan dokumen perencanaan Definisi Operasional, pengertian SAKIP menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat BPP

Bahasa. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Metode penghitungannya yaitu jumlah satuan kerja yang nilai SAKIPnya minimal BB dibagi dengan jumlah seluruh satker di BPP Bahasa dikalikan 100%.

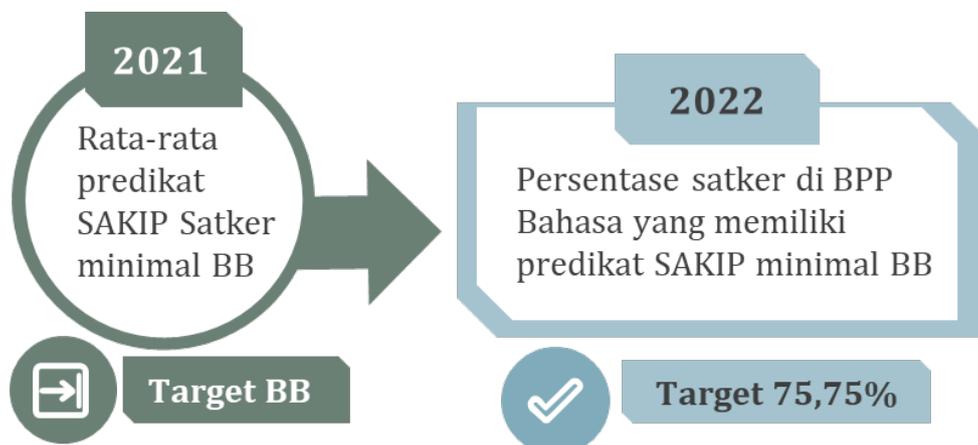
Di tahun 2022, terdapat perubahan peraturan terkait evaluasi SAKIP. Semula menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi dan Implementasi SAKIP di tahun 2021, menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP di tahun 2022.

Hal ini yang menjadi penguat Sekretariat BPP Bahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar terus berupaya sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BPP Bahasa dapat berjalan dan terimplementasi dengan baik. Berikut perubahan komponen penilaian evaluasi SAKIP Tahun 2022.



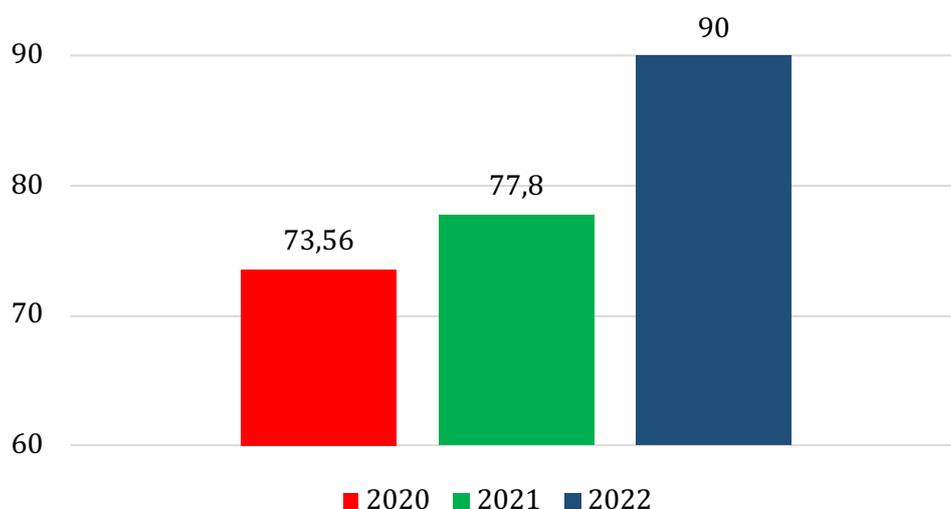
Gambar 2. Sandingan Perubahan Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022.

Perubahan nomenklatur terjadi pada saat dilakukan revisi Renstra Tahun 2020—2024. Semula nomenklatur di tahun 2021 adalah Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB, menjadi Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB. Perubahan ini karena untuk memudahkan penghitungan ketercapaian indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut yang menjadikan Sekretariat BPP Bahasa memiliki tanggung jawab dalam mendampingi satker di lingkungan BPP Bahasa untuk dapat mencapai target IKK yang tercantum dalam PK Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022. Berikut semula menjadi perubahan nomenklatur di tahun 2022.



Gambar 3. Perubahan Nomenklatur IKK Tahun 2021 dan 2022

Di tahun 2022 ini, capaian indikator Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP minimal BB dapat dicapai dengan baik oleh Sekretariat BPP Bahasa. Nilai hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek tahun 2022 yaitu sebesar 90 dengan predikat A. Jika disandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, nilai/predikat SAKIP meningkat dengan signifikan. Perolehan nilai SAKIP tahun 2020 yaitu 73,56. Perolehan nilai SAKIP tahun 2021 yaitu 77,80 (BB) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal diraih oleh Sekretariat BPP Bahasa. Peningkatan skor pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya atau kerja keras Sekretariat BPP Bahasa.



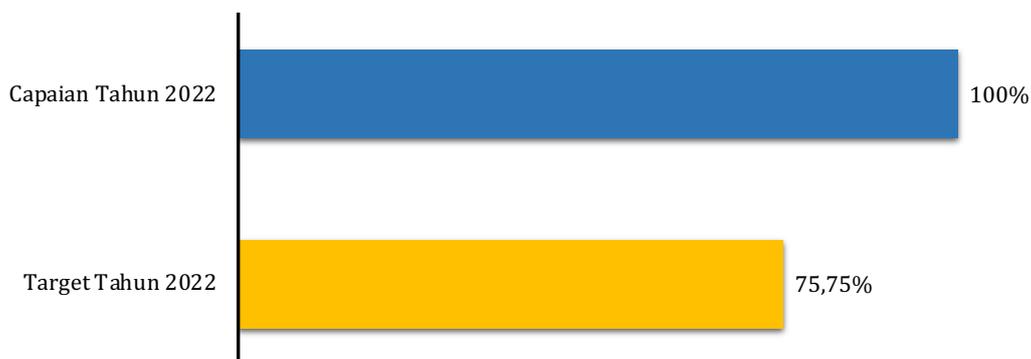
Grafik 2. Nilai SAKIP Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020, 2021 dan 2022.

Dalam mencapai target IKK Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, Sekretariat BPP Bahasa telah melakukan upaya pendampingan seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa. Berikut tabel dan grafik hasil capaian IKK tahun 2022.

Tabel 1.

Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Angka Dasar	Tahun 2022			Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (%)	69,70	75,75	100	132,01%	81,80



Grafik 3. Capaian IKK Persentase Satker di BPP Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 100% satker di lingkungan BPP Bahasa memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A. Jika disandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2021, masih terdapat 2 satker dengan predikat B, dan 17 satker dengan predikat BB, sedangkan hanya 14 satker dengan predikat A.

Tabel 2.

Tabel Sandingan Capaian dan Target Akumulasi IKK sampai dengan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022		Target Akumulasi 2024	Persentase Target	
			Target	Capaian			
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (%)	69,70	75,75	100	132,01%	81,80	122,25%

Ketercapaian IKK ini di tahun 2022 memiliki pengaruh pada akumulasi capaian sampai dengan target akhir tahun Renstra sebesar 81,80%. Jika disandingkan progres pencapaian IKK dengan target akhir masa Renstra sebesar 122,25%. Capaian ini sudah melebihi target 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.



Namun di tahun 2022, terdapat satu satker yang dikecualikan dalam penilaian evaluasi SAKIP, yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda). Hal ini dikarenakan satker tersebut baru berdiri di bulan Februari 2022, sehingga dokumen data dukung SAKIP di tahun sebelumnya tidak ada. Hal ini yang menyebabkan satker Pustanda belum dapat dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Grafik 4. Sandingan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra tahun 2024

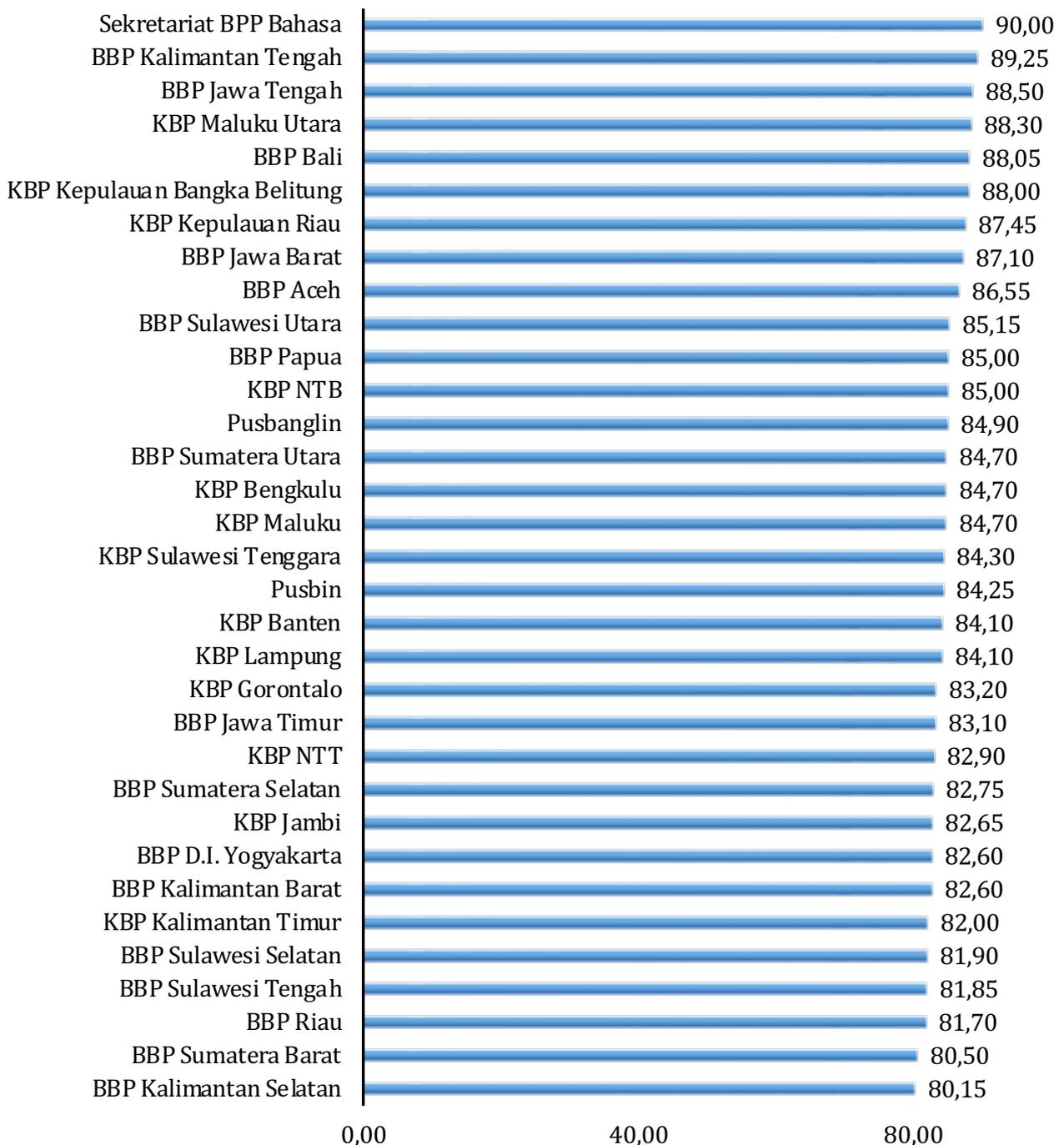
Tabel 3.
 Perbandingan Jumlah Satker Berdasarkan Predikat
 di lingkungan BPP Bahasa Tahun 2021 dan 2022

Predikat	2021				2022			
	CC	B	BB	A	CC	B	BB	A
Jumlah satker	-	2	17	14	-	-	-	33

Pencapaian kinerja satker mandiri Sekretariat BPP Bahasa pada tahun 2022 mengalami kenaikan di tahun 2022, sebesar 9,52. Di tahun 2021 predikat A dengan total nilai 80,48, dan di tahun 2022 predikat A dengan total nilai 90,00. Berikut adalah rincian nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 33 satker di lingkungan BPP Bahasa dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

No.	Nama Satker	2021		2022	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan	80,48	A	90,00	A
2	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	89,53	A	89,25	A
3	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	86,15	A	88,50	A
4	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	80,74	A	88,30	A
5	Balai Bahasa Provinsi Bali	87,27	A	88,05	A
6	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74,57	BB	88,00	A
7	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	76,32	BB	87,45	A
8	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	82,85	A	87,10	A
9	Balai Bahasa Provinsi Aceh	71,97	BB	86,55	A
10	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	79,65	BB	85,15	A
11	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	72,19	BB	85,00	A
12	Balai Bahasa Provinsi Papua	66,44	B	85,00	A
13	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	86,77	A	84,90	A
14	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	75,58	BB	84,70	A
15	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	75,17	BB	84,70	A
16	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	74,41	BB	84,70	A
17	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	82,53	A	84,30	A
18	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	73,68	BB	84,25	A
19	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	81,60	A	84,10	A
20	Kantor Bahasa Provinsi Banten	83,25	A	84,10	A
21	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	82,98	A	83,20	A
22	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	72,33	BB	83,10	A
23	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	75,92	BB	82,90	A
24	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	80,83	A	82,75	A
25	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	77,93	BB	82,65	A
26	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	71,98	BB	82,60	A
27	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	82,91	A	82,60	A

No.	Nama Satker	2021		2022	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
28	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	72,91	BB	82,00	A
29	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	76,85	BB	81,90	A
30	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	74,84	BB	81,85	A
31	Balai Bahasa Provinsi Riau	80,42	A	81,70	A
32	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	72,77	BB	80,50	A
33	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	63,84	B	80,15	A



Grafik 5.
Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPP Bahasa Tahun 2022



Gambar 4. Dokumentasi Penilaian Akhir SAKIP dengan Tim Inspektorat Jenderal

Upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat BPP Bahasa dalam rangka mencapai indikator Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, yaitu di bulan Januari s.d. November telah dilaksanakan evaluasi Lakin, penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja Triwulan I—III, evaluasi tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi, pemantauan dan evaluasi rutin setiap bulan, evaluasi dan reviu Renstra, dan pendampingan penyusunan dokumen data dukung SAKIP lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendampingan, pembekalan, arahan, penyamaan persepsi, dan identifikasi dokumen data dukung SAKIP yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penilaian mandiri juga telah dilakukan oleh Biro Perencanaan, sehingga sebelum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar tindak lanjut untuk melengkapi dokumen data dukung SAKIP satker. Upaya terakhir yang dilakukan melalui Sekretariat BPP Bahasa adalah fasilitasi kepada seluruh satker adalah melakukan konfirmasi dokumen data dukung ke Inspektorat Jenderal setelah dilakukan penilaian melalui aplikasi Spasikita. Sehingga setelah masa sanggah tersebut, beberapa satker bisa mendapatkan nilai maksimal sehingga seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa mendapatkan predikat A.

Berikut penyebab keberhasilan ketercapaian indikator kinerja kegiatan ini.

1. Koordinasi dengan mitra internal dan eksternal yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan terkait dengan pemahaman dan pendampingan pemenuhan data dukung SAKIP sesuai dengan Permendikbud 40 Tahun 2022 tentang Evaluasi SAKIP.
2. Pendampingan dan sinkronisasi kelengkapan data dukung dokumen SAKIP dan persepsi tentang mekanisme, dan tata cara penilaian evaluasi SAKIP dengan seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa.
3. Komitmen seluruh pimpinan satker terhadap pentingnya sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing satker.

Dampak yang dapat dirasakan manfaatnya dari ketercapaian IKK ini adalah satker memiliki tata kelola dalam kinerja yang transparan, akuntabel, dan efisiensi serta efektif. Sehingga satker yang dinilai memiliki sistem yang akuntabel, transparan dan efisien yang baik, akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja suatu lembaga.

Berikut kendala/hambatan, strategi, serta langkah antisipasi yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Pemahaman dan persepsi terhadap kriteria penilaian SAKIP tahun 2022 berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi SAKIP masih beragam.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik dengan mitra internal maupun eksternal terkait pemahaman dan persepsi penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022.	Mengusulkan pedoman teknis terkait pemenuhan data dukung SAKIP berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022.
Implementasi satker terkait SAKIP belum optimal.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh satker terkait dengan SAKIP baik melalui daring ataupun luring.	Pendampingan secara berkelanjutan dan penyampaian informasi kelengkapan dokumen data dukung SAKIP di triwulan pertama.

Berdasarkan cascading, berikut program/kegiatan pendukung ketercapaian IKK Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB pada setiap layanan di Sekretariat BPP Bahasa.

1. LAYANAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

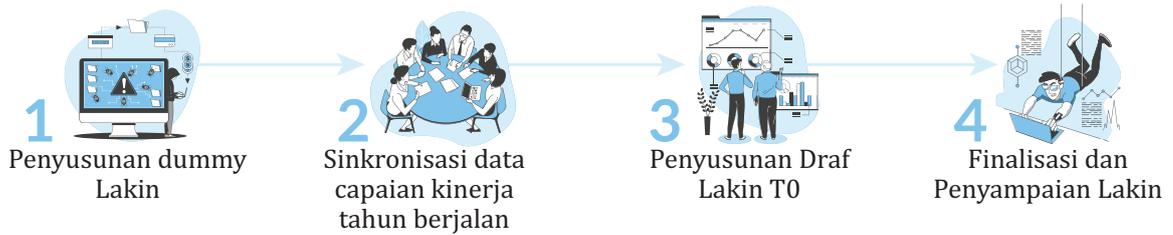
Berikut kegiatan/aktivitas prioritas yang mendukung ketercapaian layanan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.



a) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin)

Penyusunan Lakin dibagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu penyusunan Lakin Eselon I dan Penyusunan Lakin Eselon II. Dalam hal penyusunan Lakin Satker di lingkungan BPP Bahasa, tim layanan evaluasi mengakomodasi dan melakukan sinkronisasi data capaian kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi anggaran di tahun berjalan seluruh indikator yang menjadi tujuan dan sasaran, baik di balai dan kantor, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Sekretariat BPP Bahasa.

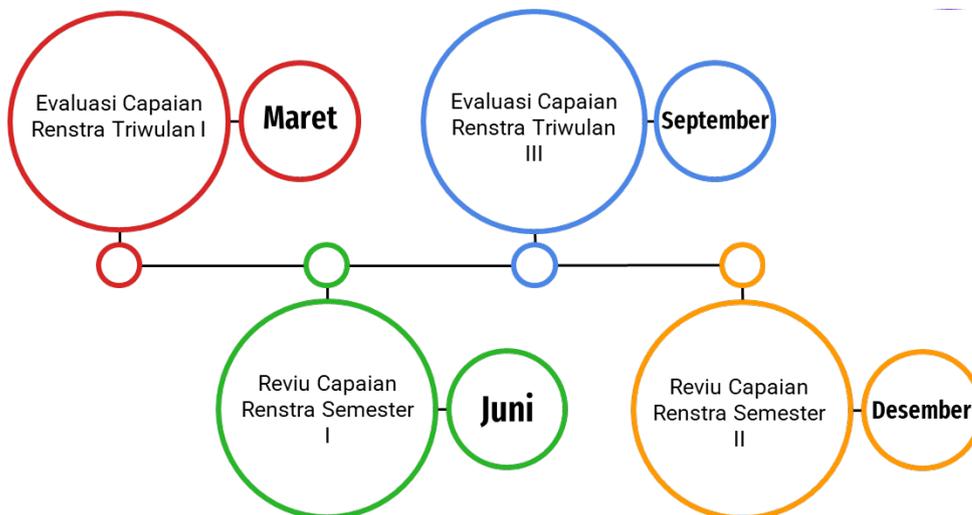
Bagan proses penyusunan Lakin.



Gambar 5. Penyusunan Lakin Eselon II di Hotel Mercure Cikini, bulan November.

Lakin menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang menjadi target dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPP Bahasa dengan target predikat minimal BB.

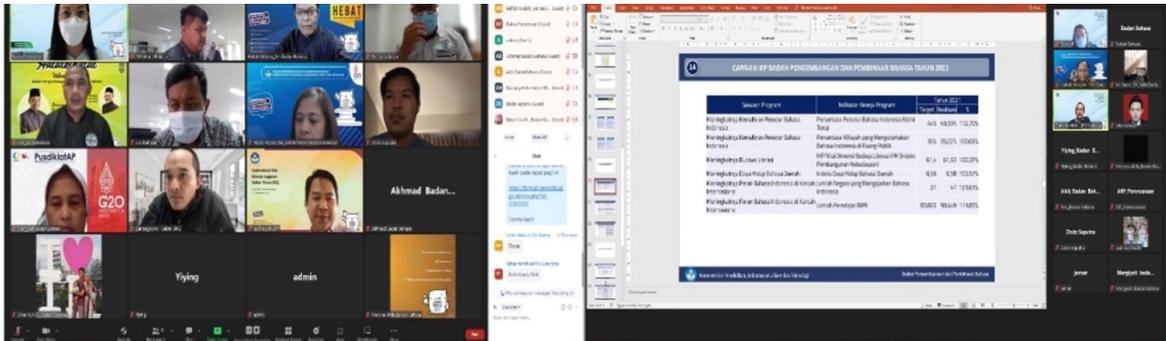
b) Reviu dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)



Gambar 6. Linimasa Reviu dan Evaluasi Renstra

Di tahun 2022, tim layanan evaluasi telah melakukan reviu Renstra Tahun 2020—2021 dan melakukan reviu capaian Renstra Revisi Tahun 2022 pada bulan Juni. Seluruh capaian indikator di satker dikompilasi sehingga dapat terlihat progres capaian indikator BPP Bahasa di triwulan II.

c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Gambar 7. Sinkronisasi dan koordinasi capaian indikator BPP Bahasa Semester I

Sekretariat BPP Bahasa melalui tim layanan evaluasi melakukan upaya monitoring, inisiasi, dan melakukan evaluasi pengumpulan data dukung SAKIP satker di lingkungan BPP Bahasa. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim layanan evaluasi dalam mencapai target indikator pada PK seluruh satker terkait nilai SAKIP adalah sinkronisasi dokumen data dukung di lingkungan BPP Bahasa melibatkan pihak ketiga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, dan penilaian mandiri SAKIP Tahun 2022 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek. Setelah seluruh proses pendampingan, sampai pada penilaian akhir dengan Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang dilaksanakan pada tanggal 4—7 November 2022.



Gambar 8. Dokumentasi Pendampingan SAKIP dengan Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek.

Pendampingan secara langsung juga telah dilakukan di bulan September ke sembilan balai dan kantor, yaitu.



Gambar 9. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan SAKIP di balai dan kantor

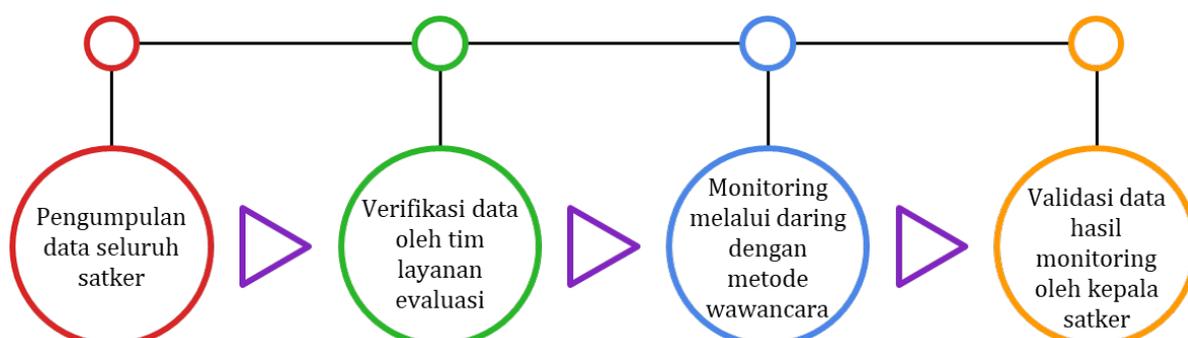
Berikut adalah tahapan upaya pendampingan SAKIP di lingkungan BPP Bahasa di tahun 2022 yang telah dilakukan oleh tim Layanan Evaluasi PPA ke seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa.



Gambar 10. Linimasa Tahapan Pendampingan SAKIP Tahun 2022

d) Monitoring dan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran

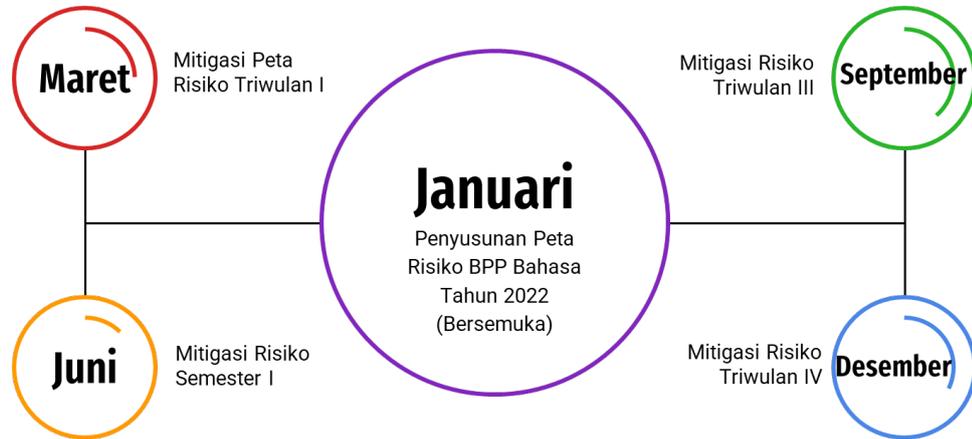
Layanan evaluasi melaksanakan monitoring dan pemantauan secara daring setiap bulan melalui format pengukuran kinerja per indikator, per komponen, sampai dengan per belanja. Selain itu, monitoring dilakukan sebagai upaya untuk sinkronisasi revisi lembar III DIPA agar nilai IKPA setiap satker dapat maksimal sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam PK, yaitu minimal nilai 91.



Gambar 11.. Proses Pendampingan Monitoring P dan A Balai dan Kantor

e) Penyusunan dan Pendampingan Peta Risiko dan Mitigasi Risiko

Kegiatan dilaksanakan agar risiko kegiatan dapat mengalami perubahan seiring dengan lingkungan internal maupun eksternal yang selalu berubah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian risiko (mitigasi risiko) untuk setiap tingkatan, baik tingkat unit kerja maupun kegiatan. Format penyampaian mitigasi risiko dilaksanakan setiap triwulan dengan metode pengumpulan data secara daring.



Gambar 12. Linimasa Pelaksanaan Manajemen Risiko

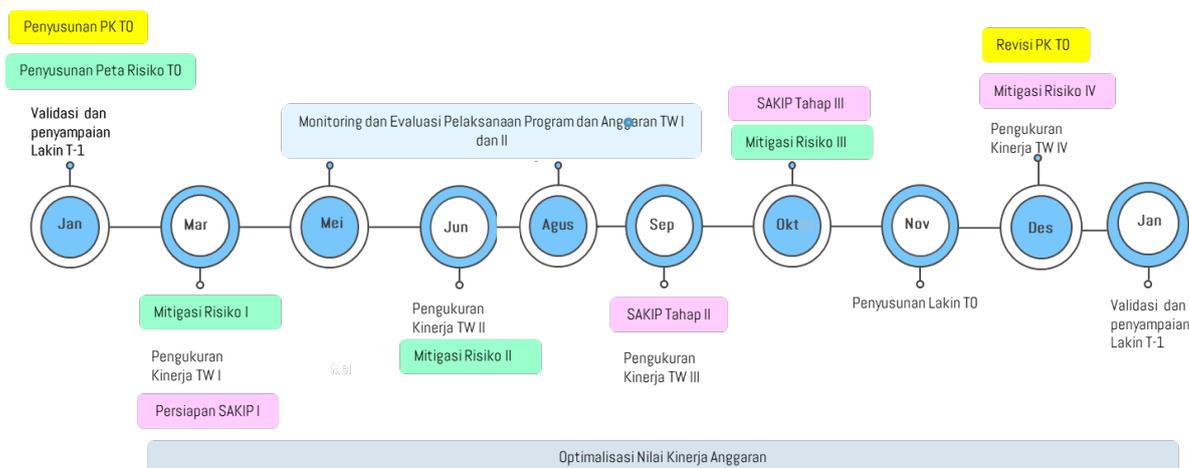
f) Optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran

Perhitungan nilai kinerja anggaran, didasarkan atas capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Perhitungan dan pemantauan dilakukan oleh layanan evaluasi bersama layanan perbendaharaan dan layanan pelaporan keuangan. Metode kerja dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring setiap bulan dengan instrumen pengukuran kinerja yang berisi progres, kendala dan strategi seluruh indikator sampai kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan anggaran. Output kegiatan ini adalah tercapainya target NKA sesuai dengan PK yaitu minimal 91 di seluruh satuan kerja di Badan Bahasa.



Gambar 13. Dokumentasi pendampingan NKA melalui daring

Secara garis besar berikut linimasa pelaksanaan kegiatan prioritas dalam layanan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, Sekretariat BPP Bahasa.



Gambar 14.. Linimasa Pelaksanaan Kegiatan di Layanan EPPA

Berikut kendala/hambatan, strategi, dan tindak lanjut yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan layanan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Pelaksanaan program dan anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sehingga rencana penarikan dana yang berubah dapat mempengaruhi nilai IKPA sebagai salah satu komponen NKA.	Melakukan monitoring secara daring dengan satker terkait dengan kesesuaian pelaksanaan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan.	Fokus mendampingi satker terhadap hasil NKA tahun 2022 yang masih dibawah target Perjanjian Kinerja, yaitu 91.

2. LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL

Berikut kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Layanan Perencanaan dan Penganggaran di Tahun 2022.

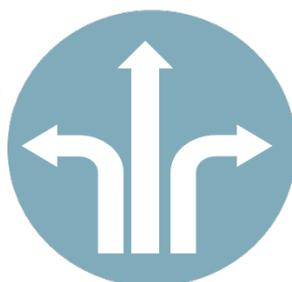
Rapat Kerja

menampilkan arah kebijakan Kepala BPP Bahasa yang dielaborasi lebih lanjut dalam rencana kerja satker pusat.

Penyusunan Rencana Kerja T+1

Kegiatan untuk menjabarkan arah kebijakan yang telah dibahas pada rapat kerja pertama. Penyusunan Rencana Kerja terdiri dari:

1. Pagu Indikatif T+1
2. Pagu Anggaran T+1
3. Alokasi Anggaran T+1



Koordinasi dengan Mitra

Pertemuan yang didasari karena adanya urgensi rencana kerja di T0, yang terdiri dari:

1. Revisi Rencana Strategis (Biro, Kementerian/Lembaga lain terkait).
2. Revisi Anggaran (DJA, Kanwil, dan sejenisnya).
3. Koordinasi inisiatif baru, contoh: Skenario program dan anggaran Duta Bahasa (arah kebijakan baru), Penyiapan Dana Alokasi Khusus Fisik Menu Buku Literasi, dan Skema Beasiswa Kebahasaan dan Kesastraan.

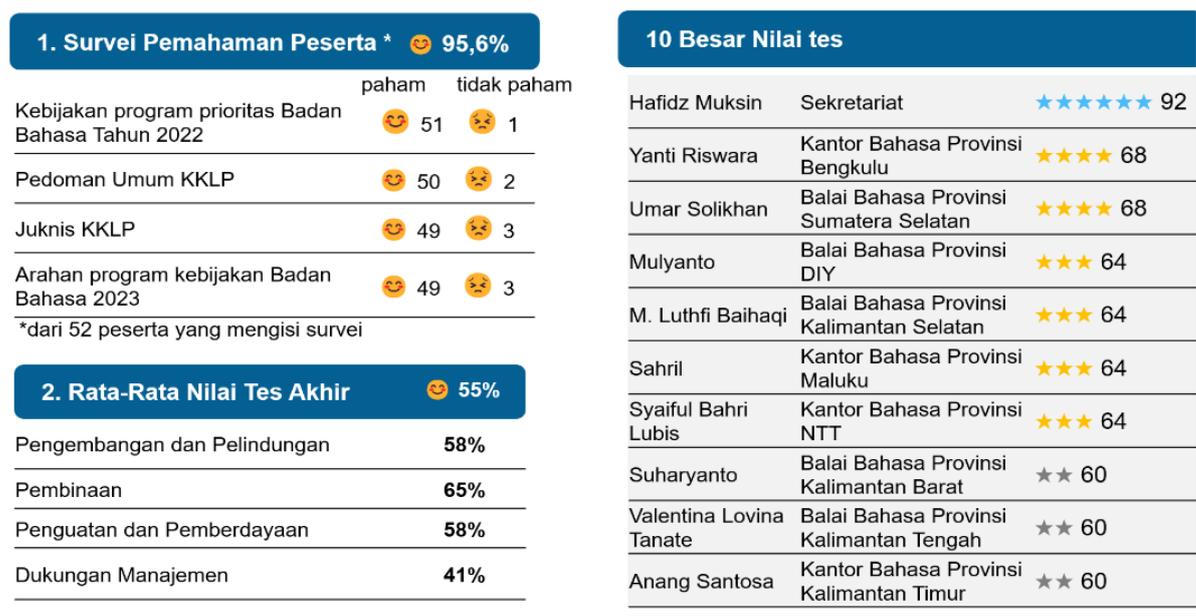
a) Rapat Kerja



Gambar 15. Rapat Kerja II tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung dihadiri oleh seluruh kepala satker di lingkungan BPP Bahasa.

Sepanjang tahun 2022, Rapat Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan sebanyak dua kali. Kedua rapat kerja dilaksanakan dalam rangka memastikan arah kebijakan pimpinan telah dipahami secara utuh oleh para kepala satuan kerja.

Rapat kerja pertama yang dilaksanakan berfokus pada strategi pelaksanaan kegiatan TA 2022 dengan mengacu pada hasil evaluasi kegiatan TA 2021. Dalam kesempatan ini ditampilkan arah kebijakan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dielaborasi lebih lanjut dalam rencana kerja satker pusat. Pendekatan yang ditempuh untuk mewujudkan rencana kerja tersebut berbasis pada Kelompok Keahlian dan Layanan Profesional (KKLP). Tiap KKLP menguraikan teknik operasional kegiatan melalui pedoman dan petunjuk teknis masing-masing agar dapat dijadikan panduan oleh semua satker pelaksana.



Gambar 16. Hasil Pre dan Post Test dalam Raker

Rapat kerja kedua yang dilaksanakan pada bulan September difokuskan pada upaya percepatan pelaksanaan program TA 2022 dan rancangan strategi untuk TA 2023. Berbagai capaian tiap satker pada TA 2022 dianalisis kesesuaiannya dengan petunjuk teknis dan pedoman lain. Rencana program TA 2023 juga dianalisis agar relevan dengan dinamika perubahan, baik kebijakan tingkat nasional, kementerian, maupun unit kerja.

b) Penyusunan Rencana Kerja

Perancangan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Sastra



Gambar 17. Rancangan Banpem BPP Bahasa

Salah satu rekomendasi kebijakan yang dirancang pada tahun 2022 berkaitan dengan rintisan bantuan pemerintah untuk komunitas sastra. Hal itu dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan geliat kesastraan di masyarakat. Dari persepektif perencanaan program, rintisan bantuan pemerintah untuk komunitas sastra ini diharapkan menjadi awal dari rencana bantuan pemerintah yang akan dirancang juga untuk komunitas bahasa dan komunitas literasi.

LINIMASA PENYUSUNAN PAGU K/L & RENJA K/L TA 2023



Gambar 18. Rancangan Banpem BPP Bahasa

Penyusunan Usulan Rencana Kerja TA 2023

Pembahasan usulan rencana kerja tahun 2023 dilaksanakan untuk menjabarkan arah kebijakan yang telah dibahas pada rapat kerja pertama. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan fokus yang berbeda untuk tiap pembahasan. Pembahasan melibatkan para koordinator KKLK dan tim penyusun program dan anggaran dari seluruh satuan kerja. Dari kedua kegiatan tersebut diharapkan adanya keselarasan antara konsep dan data yang tertuang dokumen perencanaan.

Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Pagu Indikatif TA 2023



Gambar 19. Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2023

Koordinasi penyusunan program kerja berdasarkan pagu indikatif dilaksanakan untuk menganalisis dan mempertajam usulan rencana kerja usulan rencana kerja yang dipertajam sesuai dengan skala prioritas berdasarkan perkiraan pagu yang dituangkan dalam Surat Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tentang Pagu Indikatif TA 2023.

Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Pagu Anggaran TA 2023

Koordinasi penyusunan program kerja berdasarkan pagu anggaran dilaksanakan untuk:

- mempertajam program kerja dan pagu indikatif sesuai dengan arah kebijakan dan skala prioritas;
- mendistribusikan pagu ke setiap satuan kerja; dan
- menginput data melalui aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran oleh tim perencanaan.

Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2023

Koordinasi penyusunan program kerja berdasarkan Alokasi Anggaran dilaksanakan sebanyak dua kali, dengan agenda sebagai berikut:

- reviu oleh tim APIP dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek; dan
- finalisasi rencana program BPP Bahasa sebelum dibahas dalam forum penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (DJA, Kemenkeu).

c) Koordinasi dengan Mitra

Revisi Rencana Strategis BPP Bahasa TA 2020—2024

Sehubungan dengan terbitnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024. Perubahan tersebut, antara lain, terwujud dalam penajaman sasaran, indikator, target, dan anggaran agar selaras dengan arah kebijakan. Selain itu, dicantumkan pula metode pencapaian target renstra dalam bentuk pelaksanaan program berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP).

Revisi Anggaran

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa ini didasarkan pada urgensi revisi dan kewenangan revisi oleh lembaga mitra kerja, yaitu revisi DJA sebanyak 5 kali, revisi kanwil sebanyak 3 kali revisi, dan revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 12 kali revisi.

Koordinasi Inisiatif Baru

Di tahun 2022 kegiatan ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu Skenario program dan anggaran Duta Bahasa (arahan kebijakan baru), Penyiapan Dana Alokasi Khusus Fisik Menu Buku Literasi, dan Skema Beasiswa Kebahasaan dan Kesastraan.

Kendala/Hambatan	Strategi/Tindak Lanjut t-0	Langkah Antisipasi tahun 2023
Penetapan rencana penarikan dana belum sesuai dengan rencana aksi yang diatur dalam PerdirjenPB Nomor 5 Tahun 2021	Revisi lembar III DIPA	Menyusun rencana penyerapan dana yang sesuai dengan PerdirjenPB Nomor 5 Tahun 2021

3. LAYANAN BARANG MILIK NEGARA

Berikut kegiatan prioritas layanan BMN dalam mendukung ketercapaian IKK Sekretariat BPP Bahasa.

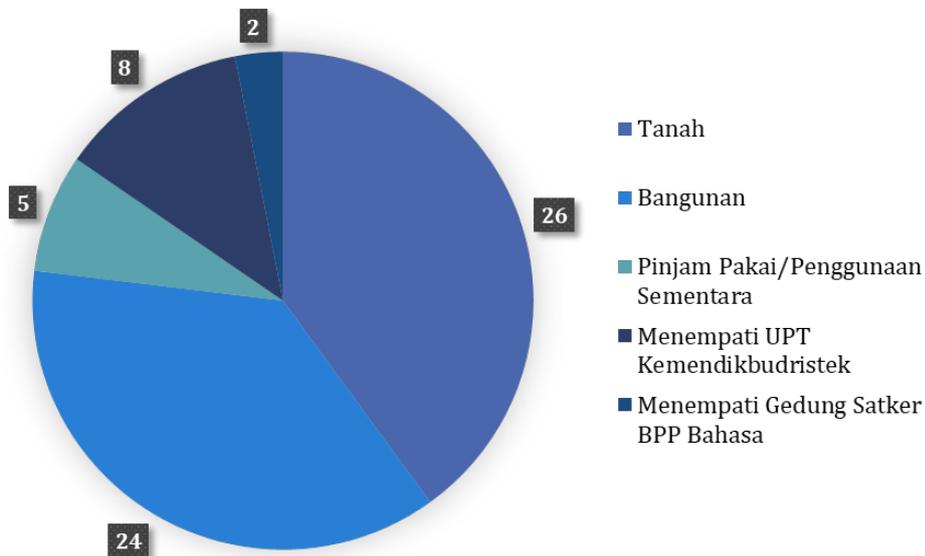


Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, terdapat empat kategori satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa, yaitu.



Gambar 20.. Kategori Kepemilikan Tanah dan Gedung di BPP Bahasa

Informasi tentang kepemilikan prasarana Balai/Kantor Bahasa sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Grafik 6. Informasi Kepemilikan Prasarana Balai dan Kantor Tahun 2022

Pada tahun 2022 ini, terdapat 5 satker yang memiliki perubahan kondisi tanah, dimana satker tersebut mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi ataupun mendapatkan pengalihan aset BMN dari Satuan Kerja Kemendikbud lainnya. Rincian perolehan aset tersebut adalah sebagai berikut.

Hibah tanah dari Pemerintah Provinsi

Satuan kerja tersebut mendapatkan hibah tanah dari pemerintah provinsi sedangkan untuk gedung dan bangunannya selama ini merupakan milik Balai/Kantor Bahasa bersangkutan.

- Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
- Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

Pelimpahan Aset BMN dari ex PAUD Dikmas

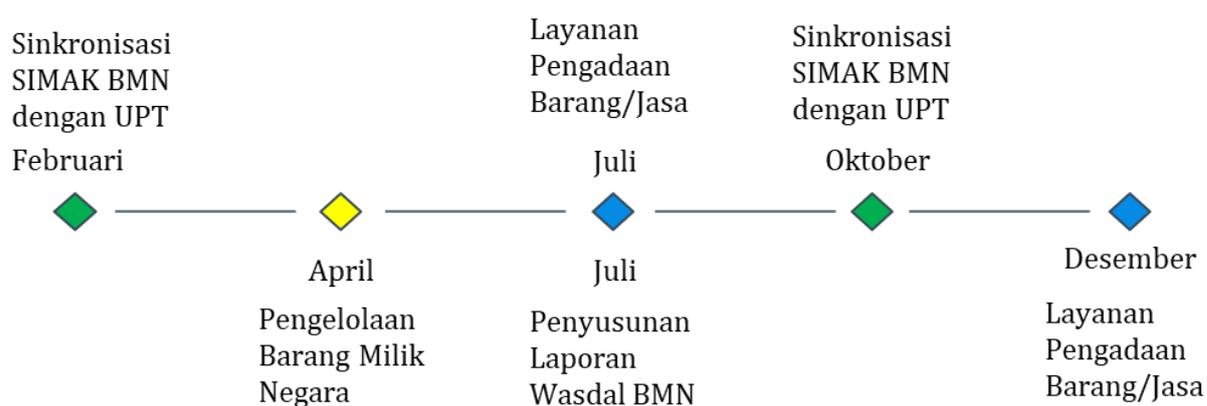
Satuan kerja tersebut mendapatkan pelimpahan tanah beserta gedung dan bangunan milik PAUD Dikmas yang telah dilikuidasi sebelumnya.

- Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
- Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Inpres 2 Tahun 2022 Layanan BMN telah melakukan langkah-langkah berikut.

1. Sosialisasi terkait TKDN untuk satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.
2. Selalu memutakhirkan pencarian barang yang ber-TKDN di laman Kementerian Perindustrian.
3. Mencari produk ber-TKDN di e-katalog.
4. Melakukan pemutakhiran pelaporan SiswaPDN.

Berikut linimasa dan penjelasan singkat kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Layanan BMN yaitu.



Gambar 21. Linimasa Layanan BMN

a) Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 22. Pembukaan Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris BPP Bahasa

Pertemuan dengan pengelola BMN untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan BMN terbaru serta PMK Nomor 213/KM.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan narasumber dari Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek berkaitan dengan Koordinasi dan Pembinaan tentang Pemanfaatan dan Penghapusan BMN.

b) Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT



Gambar 23. Kegiatan pembukaan kegiatan Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT tahap I dan tahap II.

Agenda sinkronisasi SIMAK BMN merupakan kegiatan pertemuan dengan para penyusun laporan BMN UPT yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Berikut penjelasannya.

Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT I (22—27 Mei 2022)

Tujuan: memperkuat pemahaman dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tentang penerapan aplikasi terbaru dari Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SAKTI bagi tenaga pengelola BMN dan Persediaan di lingkungan BPP Bahasa.

Output: Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara pada UPT Badan Bahasa Tahunan (*audited*) Tahun 2021 dan hasil cetak aplikasi SAKTI modul Aset Tetap dan Persediaan.



Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT II (8—11 November 2022)

Tujuan: menambah pengetahuan terkait aplikasi SAKTI setelah petugas menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan terkait aplikasi tersebut.

Output: Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara pada UPT Badan Bahasa per 31 Oktober 2022

c) Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara

Penyusunan Laporan Wasdal BMN di tahun 2022 tidak dialokasikan anggaran untuk pelaksanaannya. Namun, dilihat dari urgensinya penyusunan Laporan Wasdal tetap dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh satker melalui media *whatsapp*. Sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-99/KN/KN.2/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Perihal Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan BMN Semester 1 Tahun 2022, Eselon 1 Kemendikbudristek diwajibkan untuk mengirimkan Laporan Wasdal BMN Eselon 1 ke Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek pada bulan Juli 2022. Output yang dihasilkan adalah data wasdal BMN Eselon 1 Semester 1 Tahun 2022.

d) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa



Gambar 24. Kegiatan koordinasi pengadaan BMN UPT.

Pertemuan dan koordinasi dengan para pelaksana pengadaan BMN UPT untuk mendata, memantau progres pengadaan dan membahas permasalahan-permasalahan pengadaan agar dapat diselesaikan tanpa adanya kendala.

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang kedua, dilaksanakan untuk berkoordinasi dengan para pelaksana pengadaan BMN UPT dengan mendata, memantau progres pengadaan dan membahas permasalahan—permasalahan pengadaan agar dapat diselesaikan tanpa adanya kendala.

e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Penyusunan usulan rencana kebutuhan BMN dimaksudkan untuk melakukan koordinasi penyusunan RKBMN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan satuan kerja yang telah mengajukan RKBMN pengadaan dan RKBMN pemeliharaan serta kelengkapan berkas pendukungnya. Layanan Barang Milik Negara mengundang Satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan menggunakan anggaran masing—masing satker. Output yang dihasilkan adalah usulan RKBMN Eselon I dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Kendala dan Hambatan serta langkah antisipasi di Layanan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Kebijakan Pengadaan barang/jasa produk dalam negeri mulai diinformasikan secara masif menjelang pertengahan tahun sehingga pengadaan barang beberapa sudah di laksanakan.	Surat edaran Mendikbud Nomor 18 tahun 2022 tentang Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kemendikbudristek.	Melakukan update data barang P3DN melalui dalam pengadaan barang.

4. LAYANAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Berikut kegiatan prioritas layanan APK.

Koordinasi Pelaporan Keuangan dengan Pihak Eksternal

melakukan pencarian saran dan solusi atas kendala-kendala yang ditemui dalam proses melaksanakan tugas yang ada pada layanan APK.



Rekonsiliasi Data SAI

kegiatan untuk menyamakan pada aplikasi SAKTI modul persediaan, modul aset tetap, dan modul gl pelaporan

Penyusunan Laporan Keuangan BPP Bahasa

Kegiatan untuk mengukur indikator kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah adalah pemberian opini BPK terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKKL dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).



Tindak Lanjut Hasil Audit dan Pendampingan Pelaporan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Jenderal Kemendikbud, BPK, dan Pengawasan Masyarakat kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim Tindak Lanjut yang dibentuk BPP Bahasa

Layanan APK dalam melaksanakan kegiatan memiliki linimasa sebagai berikut.



Gambar 25. Linimasa Layanan APK

a) Koordinasi Pelaporan Keuangan dengan Pihak Eksternal



Gambar 26. kegiatan rekonsiliasi data SAI, 15 -18 November 2022

Pada tahun 2022, penyusunan laporan keuangan untuk pertama kalinya menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan banyak sekali ditemukan kendala-kendala baik dikarenakan masih kurangnya pengetahuan operator dalam menggunakan aplikasi SAKTI maupun kendala-kendala yang disebabkan oleh galat pada aplikasi SAKTI itu sendiri.

Koordinasi diperlukan untuk mencari solusi atas kendala yang dialami dengan tujuan untuk mendapatkan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk menghasilkan hal tersebut, layanan APK melakukan koordinasi dengan KPPN, DJPB, Dit. SITP, maupun dengan Biro Keuangan dan BMN dalam menyelesaikan kendala yang ada.

b) Rekonsiliasi Data SAI

Tujuan kegiatan ini selain untuk menyamakan data pada aplikasi SAKTI modul persediaan, modul aset tetap, dan modul gl pelaporan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul sampai dengan 31 oktober 2022 sehingga pada penyusunan laporan keuangan semester II (Tahunan) tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang akan menghambat tersusunnya laporan keuangan yang Wajar Dengan Pengecualian (WTP).

c) Penyusunan Laporan Keuangan BPP Bahasa



Gambar 27. kegiatan penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu penyusunan laporan keuangan untuk tahun 2021 dan laporan keuangan semester I tahun 2022. Berikut hasil kegiatan laporan keuangan BPP Bahasa.

- 1) permasalahan seputar penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2021 dan Semester I Tahun 2022, baik LK Satker maupun LK UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat diidentifikasi dan diberikan solusi.
- 2) Berita Acara Pembahasan Laporan Keuangan T.A. 2021 (*Audited*) dan Saldo Awal Satker Tahun 2022 dari seluruh satker pusat maupun UPT di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat disusun dan ditandatangani.
- 3) Laporan Keuangan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa T.A. 2021 (*Audited*) dan Semester I Tahun 2022 dapat disusun dengan baik, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- 4) Seluruh satker telah berhasil melakukan proses migrasi saldo awal Tahun 2022 dan telah mengunggah Berita Acara Migrasi ke aplikasi MONSAKTI.

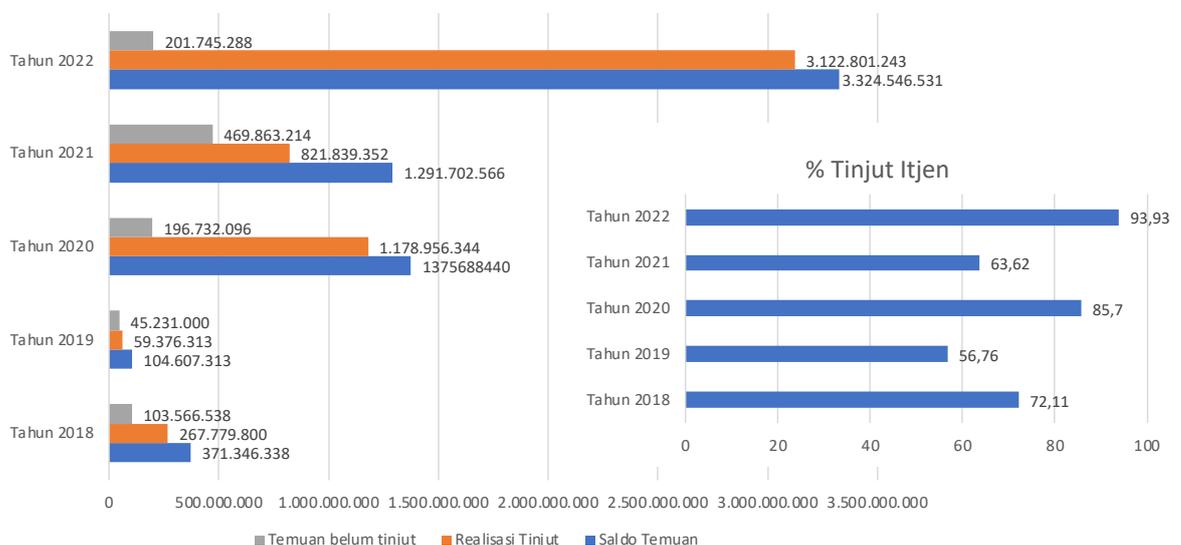
d) Tindak Lanjut Hasil Audit dan Pendampingan Pelaporan Keuangan



Gambar 28. Tindak Lanjut Hasil Audit dan Pendampingan Pelaporan Keuangan, Balai Bahasa Sulawesi Utara dan Kantor Bahasa Gorontalo

Pada kegiatan ini tim ini bertugas mendampingi satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan dan menyelesaikan permasalahan/kendala dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu juga mendampingi satuan kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik Itjen Kemendikbudristek maupun BPK RI. Yang selanjutnya hasil pendampingan tindak lanjut akan digunakan sebagai bahan rapat koordinasi tindak lanjut dengan tjen Kemendikbudristek, BPK RI dan Biro Keuangan dan BMN. Berikut Grafik hasil Rekapitulasi Saldo Temuan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek tahun 2018—2022.

No.	Uraian	Saldo Temuan Itjen Kemendikbudristek				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Saldo Temuan	371.346.338	104.607.313	1.375.688.440	1.291.702.566	3.324.546.531
2	Realisasi Tinjuit	267.779.800	59.376.313	1.178.956.344	821.839.352	3.122.801.243
3	% Tinjuit	72,11	56,76	85,70	63,62	93,93
4	Temuan belum tinjuit	103.566.538	45.231.000	196.732.096	469.863.214	201.745.288



Grafik 7. Penyelesaian Temuan Itjen Kemendikbudristek tahun 2018-2022

No.	Uraian	Saldo Temuan BPK				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Saldo Temuan	336.403.417	336.403.417	336.403.417	336.403.417	916.727.752
2	Realisasi Tinjuit	-	-	-	132.287.212	721.383.382
3	% Tinjuit	-	-	-	39,32	78,69
4	Temuan belum tinjuit	-	-	-	204.116.205	195.344.370



Grafik 8. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2022

Berikut kegiatan tindak lanjut temuan di balai dan kantor oleh Layanan APK di tahun 2022.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. BBP Sumatera Selatan | 8. BBP Jawa Timur | 15. KBP Gorontalo |
| 2. BBP Sumatera Barat | 9. KBP Nusa Tenggara Timur | 16. KBP Maluku Utara |
| 3. KBP Lampung | 10. BBP Kalimantan Barat | 17. BBP Sulawesi Tengah |
| 4. KBP Provinsi Bengkulu | 11. BBP Kalimantan Tengah | 18. KBP Maluku |
| 5. KBP Bangka Belitung | 12. BBP Kalimantan Selatan | 20. BBP Jawa Barat |
| 6. BBP Jawa Tengah | 13. KBP Kalimantan Timur | 21. BBP Papua |
| 7. BBP D.I. Yogyakarta | 14. BBP Sulawesi Utara | |

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta memetakan terjadinya resiko dalam pelaporan keuangan, maka dilakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kantor Bahasa Provinsi Banten.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Penyampaian laporan keuangan satker tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan satker untuk segera menyampaikan laporan keuangan Menyiapkan formulir isian secara daring untuk mempermudah satker dalam menyampaikan laporan keuangan 	Menyusun prosedur pengumpulan data laporan keuangan menggunakan formulir elektronik setiap periode pelaporan.

5. LAYANAN HUKUM TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Berikut aktivitas/kegiatan prioritas di layanan Hukum, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi di tahun 2022.



a) Pengkajian Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan



Pada tahun 2022, Layanan Hukum, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi menghasilkan beberapa peraturan baik yang mengatur tentang organisasi maupun jabatan fungsional dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek maupun Kementerian/

Lembaga terkait lainnya, seperti KemenpanRB, Kemenkumham, Perpustakaan, Sekretariat Negara maupun Kemenkeu.



Gambar 29. Harmonisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian

b) Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar

Penyempurnaan dan penyederhanaan peta proses bisnis, peta subproses, peta lintas fungsi, CEM dan POS sesuai dengan tugas fungsi serta tuntutan organisasi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa = 9 Proses, 27 Sub Proses, 56 CFM, 56 POS

Peta Proses Bisnis			Peta Subproses		Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map)		POS		
No	Kode	Judul Proses	No	Kode	Kode CFM	Judul Peta Lintas Fungsi (CFM)	Judul SOP		
1	BPPB-01	Pengembangan Produk Kebahasaan dan Kesastraan	1	BPPB-01.01	Pengelolaan Kebahasaan dan Kesastraan	1	BPPB-01.01.CFM.01	Penyusunan Produk Leksikografi	Penyusunan Produk Leksikografi
						2	BPPB-01.01.CFM.02	Penyusunan Bahan Ajar	Penyusunan Bahan Ajar
						3	BPPB-01.01.CFM.03	Penyusunan UKBI	Penyusunan UKBI
						4	BPPB-01.01.CFM.04	Penyusunan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Penyusunan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan
						5	BPPB-01.01.CFM.05	Penyusunan Bahan Literasi	Penyusunan Bahan Literasi
						6	BPPB-01.01.CFM.06	Penyusunan Produk Penjemernahan	Penyusunan Produk Penjemernahan
						7	BPPB-01.01.CFM.07	Penyusunan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra	Penyusunan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra
						8	BPPB-01.01.CFM.08	Penyusunan Bahan Penyuluhan	Penyusunan Bahan Penyuluhan
						9	BPPB-01.01.CFM.10	Penyusunan Peta Sastra	Penyusunan Peta Sastra
						10	BPPB-01.02.CFM.01	Penjaminan Mutu Produk Kebahasaan dan Kesastraan	Penjaminan Mutu Produk Kebahasaan dan Kesastraan
2	BPPB-02	Fasilitasi Kebahasaan dan Kesastraan	4	BPPB-02.02	Promosi Kebahasaan dan Kesastraan	11	BPPB-02.02.CFM.01	Promosi Kebahasaan dan Kesastraan	Promosi Kebahasaan dan Kesastraan
						12	BPPB-02.03.CFM.01	Penyuluhan Kebahasaan dan Kesastraan	Penyuluhan Kebahasaan dan Kesastraan
						13	BPPB-02.03.CFM.02	Layanan UKBI	Layanan UKBI
						14	BPPB-02.03.CFM.03	Fasilitasi Pembelajaran BIPA	Fasilitasi Pembelajaran BIPA
						15	BPPB-02.03.CFM.04	Layanan Ahli Bahasa	Layanan Ahli Bahasa
						16	BPPB-02.03.CFM.05	Fasilitasi Literasi	Fasilitasi Literasi
						17	BPPB-02.03.CFM.06	Fasilitasi dan Pelaksanaan Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Fasilitasi dan Pelaksanaan Penerjemahan dan Penjurubahasaan
						18	BPPB-02.03.CFM.07	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing
						19	BPPB-02.04.CFM.01	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Perorangan	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Perorangan
						20	BPPB-02.04.CFM.02	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Komunitas	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Komunitas
						21	BPPB-02.04.CFM.03	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada K/LU/PD/S	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada K/LU/PD/S
						22	BPPB-02.04.CFM.04	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Pegawai di lingkungan BPPB	Pemberian Apresiasi Kebahasaan dan Kesastraan Kepada Pegawai di lingkungan BPPB

c) Evaluasi Organisasi

Dengan diundangkannya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, maka Balai Bahasa unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang semula terdiri dari 2 eselon IIIa dan 15 eselon IIIb menjadi 17 eselon IIIa. Kantor Bahasa sendiri masih berstatus eselon IV dengan catatan dari KemenpanRB untuk terlebih dahulu melaksanakan tugas fungsi yang baru untuk kemudian di evaluasi pada tahun berikutnya, apakah layak untuk dinaikkan menjadi eselon III.

d) Koordinasi Ketatalaksanaan dengan Pihak Eksternal



Salah satu yang menjadi sasaran prioritas pada layanan hukum, tata laksana, dan reformasi birokrasi adalah koordinasi terkait perlindungan hukum terhadap produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dikarenakan ada beberapa produk yang diperjualbelikan kepada masyarakat tanpa ada persetujuan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu dilakukan identifikasi terkait produk yang akan didaftarkan baik Hak Cipta maupun Hak Merek ke Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan saat ini yang sudah selesai proses pendaftaran dan mendapatkan sertifikat hak cipta yaitu terkait Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Diharapkan untuk tahun berikutnya sebagian besar produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah terdaftar di Kemenkumham.

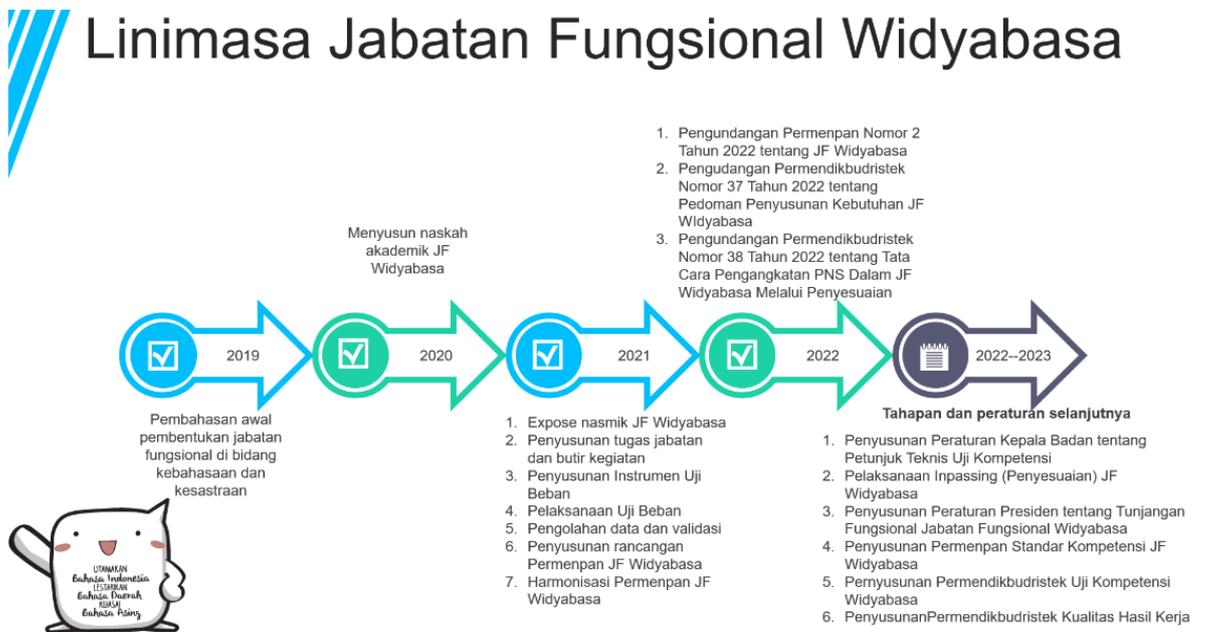
1	UKBI Adaptif	14	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 4
2	Simulasi UKBI Adaptif	15	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 5
3	KBBI Daring	16	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 6
4	Tesaurus Daring	17	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 7
5	KBBI Edisi V	18	Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia: Film BIPA 3
6	Sahabatku Indonesia BIPA 1	19	Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia: Agama dan Tradisi Spiritual BIPA 4
7	Sahabatku Indonesia BIPA 3	20	Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia: Identitas Nasional BIPA 4
8	Sahabatku Indonesia BIPA 6	21	Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta: Keluarga Betawi BIPA 1
9	Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia: Makanan BIPA 1	22	Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta: Wisata Budaya BIPA 2
10	Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia: Ekonomi BIPA 3	23	Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta: Transportasi BIPA 2
11	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 1	24	Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta: Cerita Rakyat BIPA 4
12	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 2	25	Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta: Cerita Rakyat BIPA 4
13	Sahabatku Indonesia untuk Pelajar BIPA 3		

e) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

f) Pembentukan Jabatan Fungsional Widyabasa

Dalam mendukung tugas dan fungsi di bidang bahasa dan sastra, BPP Bahasa mengusulkan sebuah jabatan fungsional yang mampu mewadahi pekerjaan pengembang, pembina, dan pelindung bahasa dan sastra. Nama jabatan fungsional yang diusulkan adalah *Jabatan Fungsional Widyabasa*. Istilah *widyabasa* dipilih menjadi nama jabatan fungsional yang mewadahi tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra ini berasal dari kata *widya* dan *basa*. Kata *widya* berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna ‘pengetahuan’ atau ‘ilmu’. Kata *basa* merupakan kata dari beberapa bahasa di Nusantara yang bermakna ‘bahasa’. Selain itu, *basa* merupakan bentuk singkat atau akronim dari *bahasa* dan *sastra*. Berdasarkan unsur pembentuk namanya, jabatan fungsional *widyabasa* mencerminkan tugas dan fungsi dari sebuah jabatan yang dilatarbelakangi pengetahuan atau ilmu tentang kebahasaan dan kesastraan. Dengan demikian, jabatan fungsional tersebut memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan fungsional tersebut memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.



Gambar 30. Linimasa jabatan fungsional widyabasa.

Selain jabatan fungsional, melalui layanan HTL, Sekretariat Badan juga menyusun peta proses bisnis level 4 yang mana menjelaskan alur atau proses kerja pada lingkup unit utama. Diharapkan dengan tersusunnya peta proses bisnis Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa maka tergambarakan hubungan kerja yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Belum adanya petunjuk teknis pencapaian Zi-WBK/WBBM	Pendampingan ke satker-satker yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	Melakukan penyusunan petunjuk teknis pencapaian Zi-WBK/WBBM

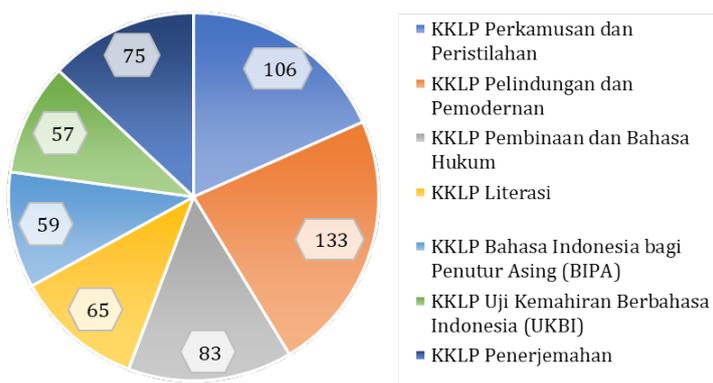
6. LAYANAN KEPEGAWAIAN

Kegiatan prioritas layanan kepegawaian sebagai berikut.

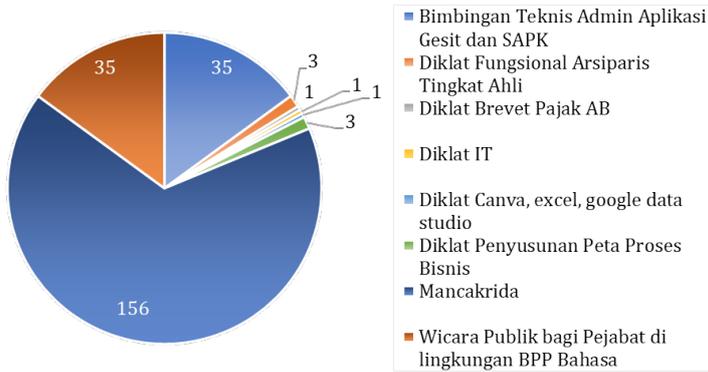


Gambar 31. Kegiatan Prioritas di Layanan Kepegawaian

Berikut adalah rekapitulasi peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan BPP Bahasa yang telah dilaksanakan oleh layanan kepegawaian.



Total jumlah peserta Peningkatan Kompetensi anggota dari 7 Kelompok Kerja Layanan Profesional sebanyak 578 orang.



Total jumlah peserta Peningkatan Kompetensi tenaga administrasi sebanyak 235 orang.

Berikut adalah kendala/hambatan, strategi atau tindak lanjut dari hambatan/kendala, dan langkah antisipasi tahun 2023.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Kurangnya pemahaman seluruh pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian	Melakukan peningkatan kompetensi SDM di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural secara menyeluruh	Menyusun pedoman pengelolaan kepegawaian mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku
Peningkatan kompetensi di bidang administrasi belum terlaksana secara optimal	Identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing layanan yang sifatnya mendesak	Menyusun program kerja peningkatan kompetensi SDM di bidang administrasi

7. LAYANAN KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI

Berikut kegiatan prioritas layanan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi.

Publikasi Digital

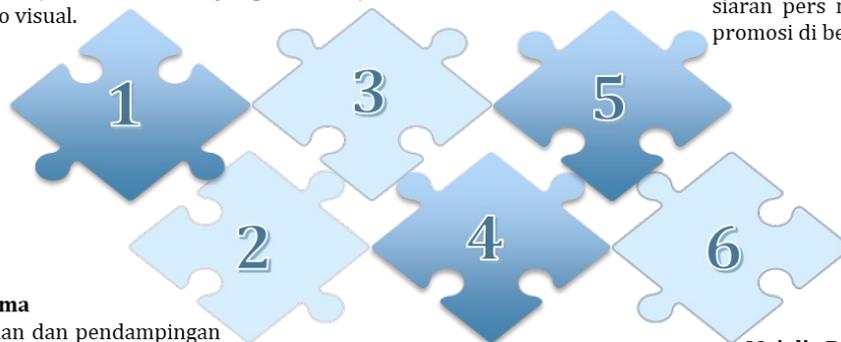
Kegiatan pengembangan informasi dari bentuk teks menjadi bentuk infografik dan audio visual.

Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera)

Forum kerja sama kesastraan antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang berdiri sejak 1995.

Layanan Kehumasan

Peliputan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, penyusunan naskah konten media sosial, penerbitan hasil liputan, berupa siaran pers maupun berita, dan promosi di berbagai media.



Layanan Kerja Sama

Layanan pengelolaan dan pendampingan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dari satker di lingkungan BPP Bahasa dengan mitra kerja.

Pengelolaan dan Publikasi Ilmiah

Jurnal Ranah dan Jentera yang memiliki akreditasi Sinta 2, Jurnal Rampak Serantau dan Buletin Mabbim, serta Majalah Pusat yang terdiri dari 3 edisi.

Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim)

Majelis kebahasaan yang beranggotakan tiga negara sejak tahun 1959.

Berikut peta ketersebaran kerja sama BPP Bahasa dengan pihak luar atau mitra kerja.

**PETA KERJA SAMA BADAN BAHASA DENGAN PERGURUAN TINGGI,
PEMKOT, DAN PEMDA JANUARI—DESEMBER 2021**



Gambar 32. Peta Kerja Sama Tahun 2021

**PETA KERJA SAMA BADAN BAHASA DENGAN PERGURUAN TINGGI,
PEMKOT, DAN PEMDA JANUARI—DESEMBER 2022**



Gambar 33. Peta Kerja Sama BPP Bahasa Tahun 2022

Sementara itu, hambatan atau permasalahan yang dialami dalam mencapai target kinerja beserta strategi penanggulangan hambatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Penerimaan draf nota kesepahaman/perjanjian kerja sama terlalu berdekatan dengan waktu penandatanganan yang biasanya sudah dijadwalkan oleh UPT	Melakukan komunikasi awal dan intens dengan pihak UPT yang mengajukan kerja sama.	Menyosialisasikan kembali tahapan serta alur penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sampai pada tahap penandatanganan.
Konten-konten di media sosial dirasa kurang variatif	Dilakukan pemutakhiran anggota tim konten media digital	Dilakukan pelatihan khusus bagi tim konten media digital
Produk dan Layanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih kurang terpublikasikan kepada masyarakat	Melakukan promosi produk dan layanan di lingkungan BPP Bahasa secara masif	Melakukan penjadwalan kegiatan/peluncuran Produk/ layanan dari tiap satker/UPT untuk satu tahun penuh

8. LAYANAN INFRASTRUKTUR, JARINGAN, DATA, DAN SISTEM INFORMASI

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh layan Data dan Infromasi, yaitu.



Pengembangan Sistem Informasi

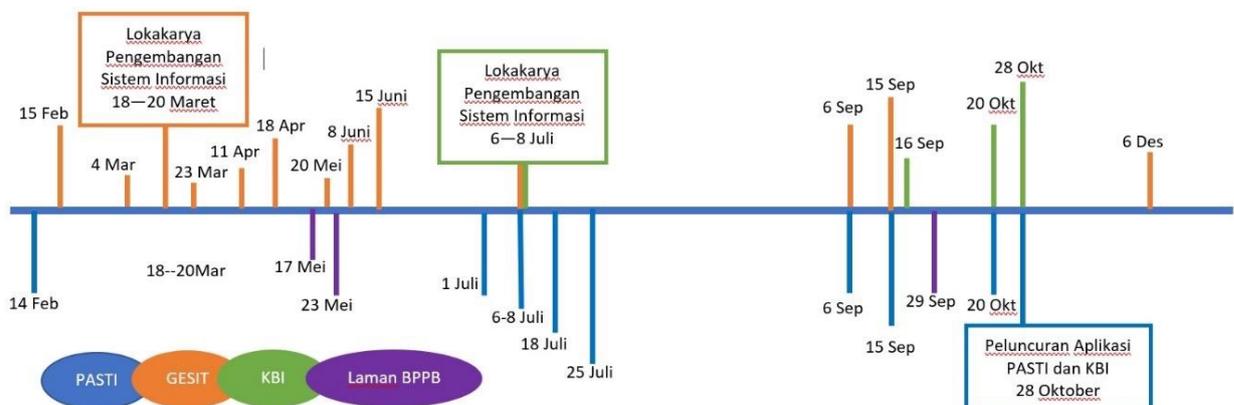
Pengembangan sistem informasi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan, merawat, dan mengelola sistem informasi untuk menampilkan informasi publik, seperti laman BPP Bahasa, Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan, Gerakan Literasi Nasional (GLN), Peta Bahasa, dan sistem informasi lain di lingkungan BPP Bahasa

Pengelolaan data dan informasi kebahasaan dan kesastraan

1. Penyusunan Data Statistik Kebahasaan dan Kesastraan
Hasil kerja sama BPP Bahasa dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Data Kebahasaan dan Kesastraan
Hasil kerja sama BPP Bahasa dengan tim Staf Khusus Menteri (SKM)

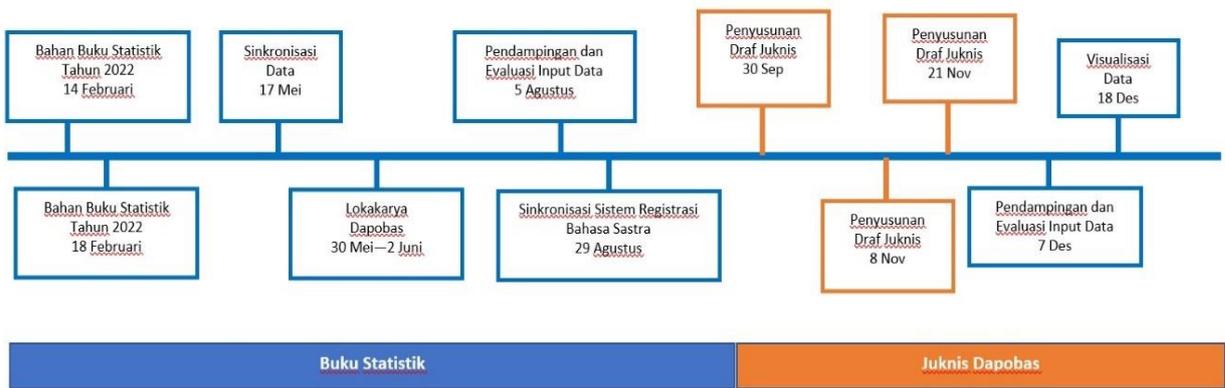


Lini Masa Pengembangan Sistem Informasi



Gambar 34. Linimasa Pengembangan Sistem Informasi

Lini Masa Pengelolaan Data dan Informasi



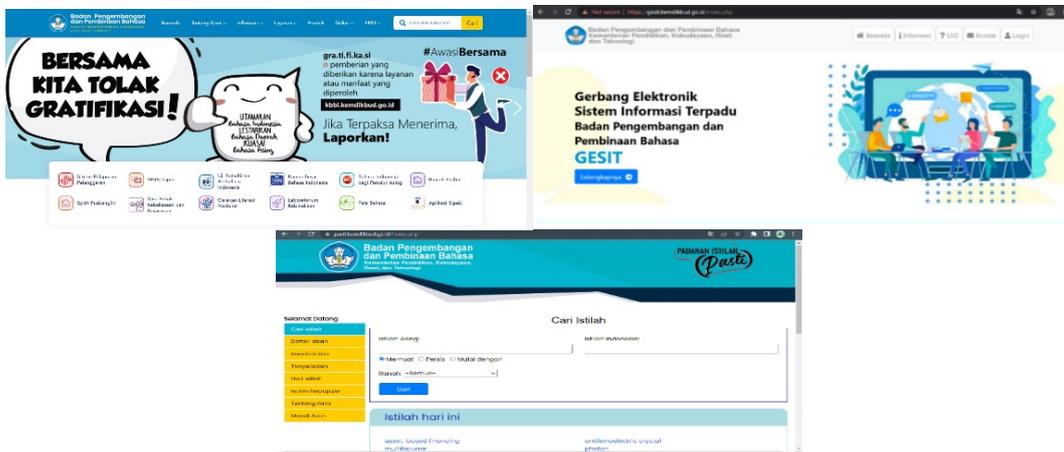
Gambar 35. Linimasa Pelaksanaan Kegiatan Layanan Datin

a) Pengembangan sistem informasi

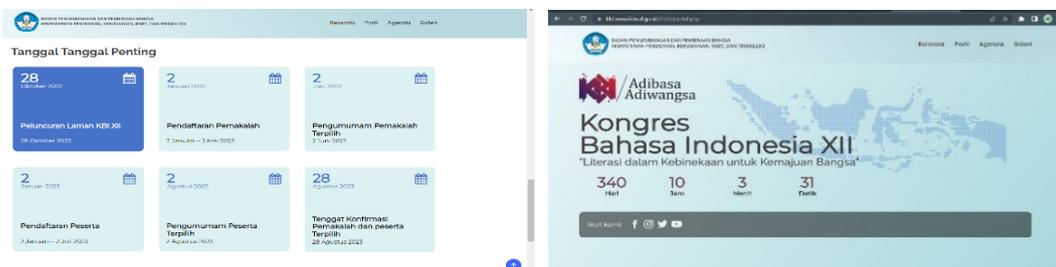
Kegiatan dalam pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam rangka mengembangkan, merawat, dan mengelola sistem informasi untuk menampilkan informasi publik guna mendukung kemudahan akses terhadap informasi publik oleh berbagai pemangku kepentingan.



Gambar 36. Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi



Gambar 37. Laman BPPB Bahasa, GESIT, dan PASTI



Gambar 38. Laman Kongres Bahasa Indonesia XII bisa diakses secara daring di alamat kbi.kemdikbud.go.id.

b) Pengelolaan data dan informasi kebahasaan dan kesastraan

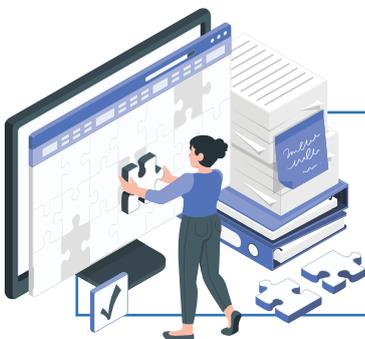


Gambar 39. Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan dalam Rangka Pengelolaan Data dan Informasi, Hotel Ciputra, Jakarta Barat

Layanan Data dan Informasi dalam meningkatkan kinerja sistem Dapobas melakukan upaya pengelolaan data dan informasi kebahasaan dan kesastraan, yang diintegrasikan antar aplikasi dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan Dapobud (Data Pokok Kebudayaan), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Sehingga Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin selaku wali data di lingkungan kemendikbudristek

berupaya mengintegrasikan semua Data Pokok tersebut sehingga menjadi data yang akurat, tepat, dan terpercaya.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
<p>Pengelolaan Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan tidak berjalan sesuai rencana</p> <p>Tidak semua Pusat atau Balai/kantor memiliki petugas khusus untuk pengelolaan data, petugas yang ditunjuk memiliki kesibukan dan pekerjaan sesuai jabatannya</p>	Edaran pimpinan agar setiap Satker menunjuk staf pengelola data dan tim pengelola data	Mengusulkan agar setiap pengelola data diberikan honorarium sesuai hasil lokakarya Dapobas
Pemahaman terhadap manajemen data masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan pertemuan (lokakarya) pengelolaan data pokok kebahasaan dan kesastraan setiap tahun; dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolalaan Data 	Peningkatan kompetensi SDM di bidang pengelolaan data
Masih banyak data yang disimpan perorangan dan belum divalidasi oleh masing-masing satker	<ol style="list-style-type: none"> pendampingan pengelolaan data kebahasaan dan kesastraan di setiap satker yang dibuat secara rutin 2 kali dalam setahun; dan membuat grup diskusi khusus dengan aplikasi Whatsapp. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan evaluasi input data Balai/ Kantor Bahasa secara rutin 2 kali dalam setahun; dan Memfaatkan grup WA secara maksimal dalam hal koordinasi dan diskusi



2

Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan BPP Bahasa yang terdiri dari Pusat, Sekretariat BPP Bahasa, dan UPT. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Dasar Hukum PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dokumen Definisi Operasional, metode penghitungan yang digunakan adalah Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I.

Di tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur sebagai akibat adanya Revisi Renstra Tahunan 2020—2024. Berikut semula menjadi perubahan nomenklatur pada indikator ini.



Gambar 40. Perubahan Nomenklatur indikator Tahun 2021 dan 2022

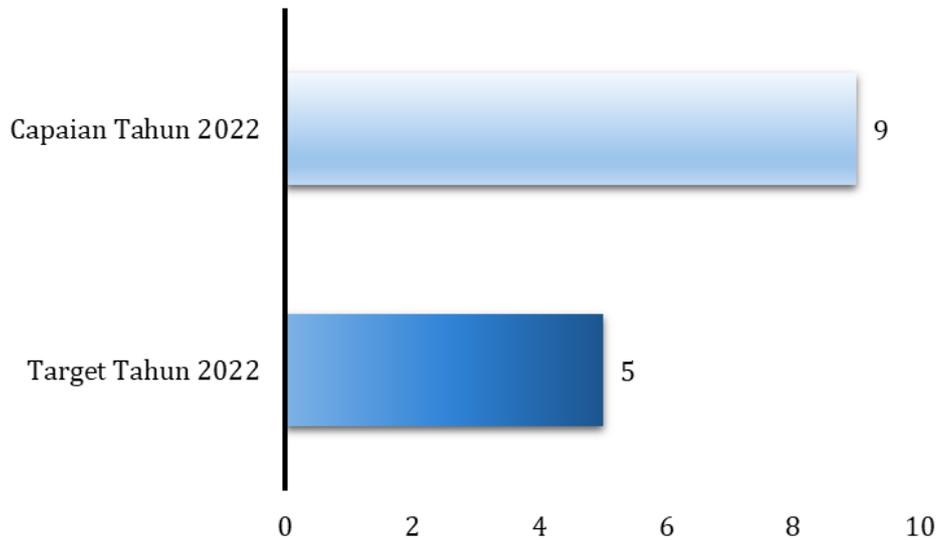
Sekretariat BPP Bahasa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, telah melakukan seleksi terhadap 33 satuan kerja yang ada. Sesuai Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 minimal persyaratan unit kerja/satuan kerja yang dicalonkan menjadi satuan kerja berpredikat ZI-WBK adalah

1. merupakan core layanan utama dari instansinya;
2. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
3. memiliki persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%;
4. melaporkan nilai LHKPN dan LHKASN 100%; dan
5. memiliki nilai minimal SAKIP B.

Untuk melihat capaian indikator tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 4.
Tabel Capaian IKK Jumlah Satker di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM Tahun 2022

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Angka Dasar	Tahun 2022		
			Target	Capaian	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	5	5	9	180%



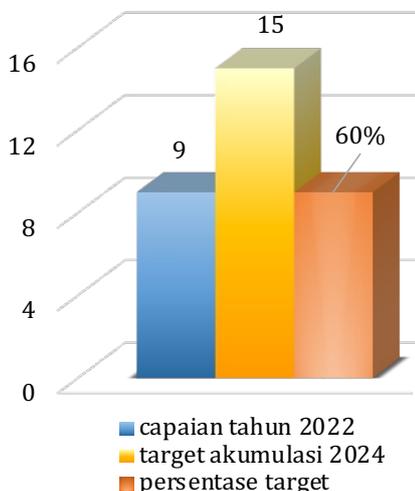
Grafik 9. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022

Jika target IKK Jumlah Satker di BPP Bahasa yang diusulkan mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM diakumulasi sampai dengan akhir tahun Renstra, maka total satker yang diusulkan oleh BPP Bahasa sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 15 satker. Berikut sandingan capaian IKK di tahun 2024 dengan target IKK akumulasi sampai dengan tahun 2024.

Tabel 5.

Tabel Sandingan Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022		Target Akumulasi 2024	Persentase Target
		Target 2022	Capaian		
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	5	5	9 180%	15	60%



Grafik 10. Grafik Sandingan Target dan Capaian Akumulasi sampai dengan Tahun 2024.

Capaian kinerja IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di tahun 2022 sebanyak 9 satker dengan capaian akumulasi akhir Renstra tahun 2024 sebanyak 15 satker. Sehingga jika disandingkan dengan target akhir Renstra akumulasi, sudah tercapai sebanyak 60%.

Berdasarkan kriteria tersebut maka didapatkanlah satu satuan kerja calon ZI-WBBM yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, serta delapan satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM yaitu: 1) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta, 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa

Timur, 4) Balai Bahasa Provinsi Bali, 5) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, 6) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, 7) Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan 8) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian **diusulkan** ke pada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Instansi (TPI) di lingkungan Kemendikbudristek dengan surat Nomor 0913/11/OT.01.03/2022 tanggal 25 maret 2022. Berikut hasil capaian kinerja IKK Jumlah satker di BPP Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.



Gambar 41. Tim RBI Badan Bahasa Tahun 2022

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa adalah melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZI-WBK. Pendampingan dilakukan oleh tim RBI dan Asesor BPP Bahasa pada bulan April—Mei dengan tujuan untuk mereviu kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Pada dasarnya setiap satuan kerja telah melaksanakan enam area perubahan, tetapi belum terdomentasikan dan di evaluasi secara berkala. Pada tahun 2022, KemenpanRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), terdapat meksnisme baru yaitu pembatasan pengusulan dari tiap Kementerian/Lembaga, untuk Kemendikbudristek pada Tahun 2022 maksimal dapat mengajukan 15 satuan kerja. Berdasarkan penilaian oleh TPI, dari sembilan satuan kerja yang diusulkan menjadi satker ZI-WBK/WBBM terdapat tujuh satker yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan penilaian pada tahap selanjutnya, hanya saja dikarenakan adanya perubahan pembatasan satuan kerja maka nantinya akan disaring kembali menjadi tiga sampai empat satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan mekanisme yang ditentukan di Kemendikbudristek. Berikut alur proses pengusulan satker untuk memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.



Gambar 42. Pendampingan Tim RBI ke BBP Bali



Gambar 43. Mekanisme Penilaian ZI-WBK/WBBM Satker Tahun 2022

Sehingga dari target indikator yang diusulkan oleh BPP Bahasa sebanyak 5 satker, telah tercapai 9 satker memenuhi kriteria syarat minimal satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Berikut penyebab keberhasilan pencapaian target IKK Jumlah Satker di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

1. Satker yang telah mengumpulkan data persyaratan pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh KemenpanRB.
2. Sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa pada calon satker usulan ZI-WBK/WBBM sudah dipahami dan diimplementasikan oleh satker-satker tersebut.
3. Inovasi di setiap area perubahan telah disiapkan dan dilakukan oleh setiap satker dalam rangka memberikan nilai tambah ZI-WBK/WBBM.

Berikut kendala/hambatan, strategi, dan langkah antisipasi yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja Jumlah Satker di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
Belum ada pedoman standar sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya yang sesuai dengan standar/aturan dari Kemenpan RB sebagai acuan satuan kerja dalam memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.	Menggunakan pedoman standar mitra internal yaitu dari Biro Hukum dan Tata Laksana di Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Mengusulkan untuk menyusun pedoman standar sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya yang sesuai dengan standar/aturan dari Kemenpan RB sebagai acuan satuan kerja dalam memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.

Dampak dari ketercapaian indikator ini adalah adanya upaya-upaya yang dilakukan satker dalam melakukan kebiasaan atau budaya reformasi birokrasi yang dapat dimulai dengan menjadi satker berpredikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Indikator ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola kelola manajemen yang baik.

Berdasarkan cascading, berikut program/kegiatan pendukung ketercapaian IKK Jumlah Satker di BPP Bahasa yang Diusulkan Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM pada setiap layanan di Sekretariat BPP Bahasa.

1. LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Berikut kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan di tahun 2022.



Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT dan Pusat
dilaksanakan dengan maksud meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan para pengelola keuangan satuan kerja memiliki persepsi yang sama dalam memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan.



Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan Pihak Eksternal
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi dalam pengelolaan perbendaharaan dan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait aturan keuangan terkini.



Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjangkau informasi dan permasalahan Pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa serta pemahaman yang sama terkait pengelolaan keuangan.

a) Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT dan Pusat

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir temuan atas audit operasional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan dilaksanakan sampai dengan semester satu tahun anggaran 2022 di tujuh Balai/Kantor Bahasa, yaitu.



Pada semester dua dilakukan perubahan target pendampingan pengelolaan keuangan dialihkan pada dua belas Balai/Kantor Bahasa penerima tambahan dana BUN untuk mendukung kegiatan Revitalisasi Bahasa dan sastra daerah. Kedua belas satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat,
2. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,
3. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan,
4. Balai Bahasa Provinsi Bali,
5. Kantor Bahasa Provinsi NTB,
6. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Balai Bahasa Provinsi Papua,
8. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur,
9. Kantor Bahasa Provinsi Maluku,
10. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara,
11. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, dan
12. Kantor Bahasa NTT.



Gambar 44. Pendampingan Pengelolaan Keuangan di KBP NTT dan BBP Papua

b) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan Pihak Eksternal

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi dalam pengelolaan perbendaharaan dan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait aturan keuangan terkini. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan peserta maupun nara sumber dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat-pusat, Balai Bahasa/ Kantor Bahasa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 3, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pulogadung, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP).



Gambar 45. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan

Narasumber terkait diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan aturan-aturan atau kaidah yang berlaku yang terkait antara lain tentang mekanisme pengelolaan anggaran, pajak, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan keuangan sehingga tercipta harmonisasi yang baik dalam rangka pengelolaan pelaksanaan pencairan anggaran.

Kegiatan ini dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Februari, Agustus, dan Desember Tujuan kegiatan ini untuk memberikan kesamaan pemahaman dan penafsiran sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lancar.

c) Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan



Gambar 46. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaring informasi dan permasalahan Pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta pemahaman yang sama terkait pengelolaan keuangan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta tatap muka dari pengelola keuangan Sekretariat Badan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa, dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, serta 30 peserta dari Balai/Kantor Bahasa yang mengikuti kegiatan melalui line zoom, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan serta unit-unit terkait.

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi tahun 2023
1. TUP tidak terpakai habis dan dikembalikan tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> menginformasikan kepada para pelaksana kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai rencana pengajuan TUP adanya lembar permohonan TUP dari masing masing penanggungjawab minimal 2 minggu sebelum pengajuan TUP 	<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan koordinasi antara PPK, Bendahara dengan pelaksana kegiatan tentang dokumen SPJ yang akan diajukan pengembalian sisa dana TUP tidak dilakukan di hari terakhir batas pengajuan SPJ PTUP penerbitan dan penguploadan SPM tidak dilakukan di hari terakhir batas pengajuan SPJ PTUP adanya aplikasi yang dapat menerima kiriman data dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas di manapun sehingga bendahara dapat memproses data tersebut
2. Penyerapan anggaran di bawah persentase yang tertuang dalam Rencana Penarikan Dana (RPD).	<ol style="list-style-type: none"> melakukan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan monitoring prognosis yang telah disusun. membuat jadwal kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh kemenkeu memanfaatkan POS 	<ol style="list-style-type: none"> membuat jadwal kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh kemenkeu konsisten terhadap jadwal yang sudah dibuat melakukan rapat rutin perbulan tentang rencana dan penyerapan anggaran
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi kegiatan atau belanja yang dapat dilaksanakan dan yang sulit dilaksanakan Meningkatkan disiplin dalam hal melengkapi dokumen pertanggungjawaban Memastikan pengajuan Tambahan Uang Persediaan telah memperhatikan kebutuhan riil secara akurat Memastikan kesesuaian Capaian Output dengan Target dan Ketepatan serta Pengiriman 	<ol style="list-style-type: none"> Para Pengelola Keuangan dan Penanggung Jawab kegiatan berkoordinasi dalam hal identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan serta segera melengkapi berkas pertanggungjawaban untuk kegiatan yang telah terlaksana Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengajuan TUP yang sudah diproses Capaian Output harus segera dikirim dalam kesempatan pertama atau di awal bulan serta memastikan tidak ada GAP yang melebihi 20% persen antara Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik

2. LAYANAN UMUM DAN SARANA PRASARANA

Berikut adalah kegiatan prioritas layanan umum dan sarana prasarana yang mendukung ketercapaian IKK.



a) Layanan Keprotokolan

Peresmian Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (22 Maret 2022).



Gambar 47. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meresmikan Unit Layanan Terpadu didampingi oleh Pejabat Badan Bahasa



Gambar 48. Kegiatan jumpa sapa Mendikbudristek dengan seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat dan Pusbin, tanggal 23 November 2023.

b) Layanan Ketatausahaan



Gambar 49. Kegiatan Koordinasi Ketatausahaan dalam rangka layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan



Gambar 50. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Sekretariat Badan tahun 2022



Gambar 51. Pemusnahan Arsip di Aspex Kumbong, Cileungsi

c) Layanan Keamanan dan Sarpras

Terkait dengan layanan keamanan, Sekretariat BPP Bahasa memberikan bimbingan teknis kepada petugas keamanan dalam penanganan keamanan di lingkungan kantor oleh kepolisian.

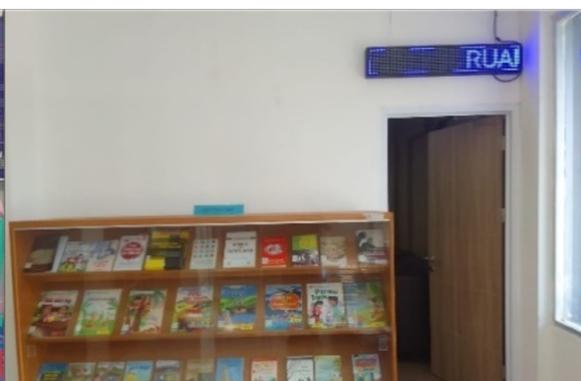


Gambar 52. Ruang Kontrol CCTV dan Keamanan di BPP Bahasa

d) Layanan Ramah Anak, Unit Layanan Terpadu, Poliklinik, Ruang Sinar, dan Perpustakaan



Gambar 53. Ruang Ramah Anak



Gambar 54. Ruang Sinar BPP Bahasa.



Gambar 55. Unit Layanan Terpadu yang dikelola oleh Sekretariat BPP Bahasa

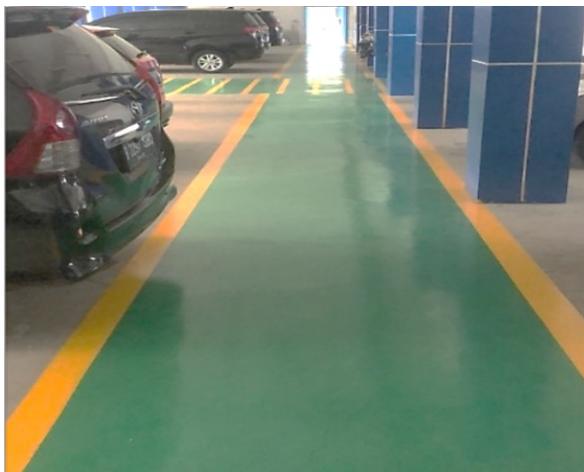
e) Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lainnya



Gambar 56. Pemberian Petunjuk Arah



Gambar 57. Pemasangan Pintu Tempat Wudu Musala



Gambar 58. Pengecatan Lahan Parkir

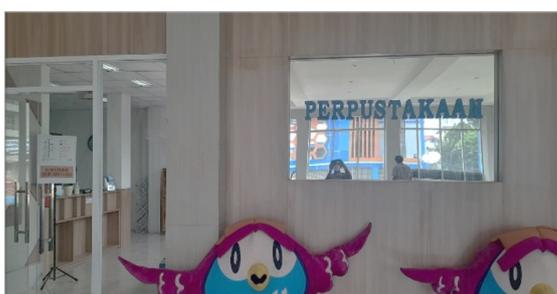


Gambar 59. Pengecatan Jalan ke Musala



Gambar 60. Pengecatan Kanstin dan Pemasangan ACP

f) Layanan Pengelolaan Perpustakaan



Gambar 61. Perpustakaan BPP Bahasa



Gambar 62. Koleksi Perpustakaan BPP Bahasa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, adalah serangkaian kegiatan perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan standar perpustakaan yang lebih baik, meliputi standardisasi koleksi, pelayanan, sarana dan prasarana, SDM, dan pengelolaannya. Sekretariat BPP Bahasa dalam melakukan peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan tahun 2022, melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

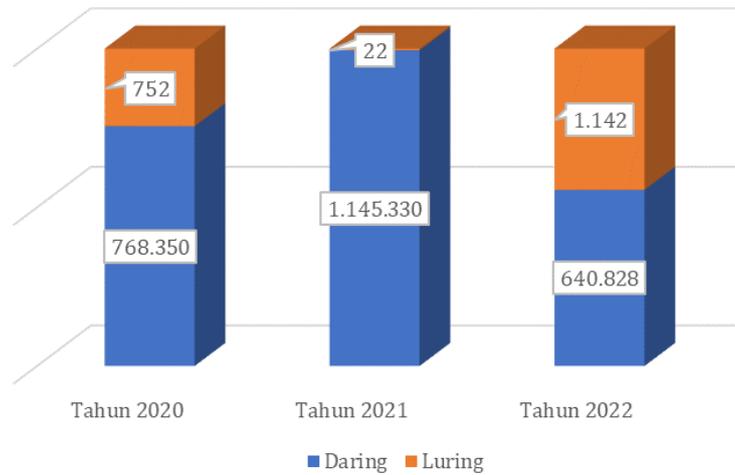
Berlanggaran e-Jurnal

Perpustakaan BPP Bahasa berlangganan e-Jurnal untuk memperkaya koleksi. Koleksi perpustakaan BPP Bahasa pada tahun 2022, yaitu sebanyak 34.862 koleksi dan 46.358 eksemplar.

Jasa Penjilidan dan Perbaikan Fisik Koleksi yang Rusak

Jasa penjilidan dan perbaikan fisik koleksi yang rusak sebanyak 600 eksemplar dilakukan untuk menjaga koleksi dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat ketika membaca koleksi Perpustakaan BPP Bahasa.

Tambahan koleksi buku tahun 2022 berasal dari sumbangan perorangan, instansi lain, dan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebanyak 800 eksemplar.



Grafik 11. Pengunjung Perpustakaan sejak tahun 2020 sampai tahun 2022

Bedah Buku



Gambar 63. Sambutan Kepala dan Sekretariat BPP Bahasa pada acara Bedah Buku

Bedah buku menjadi satu kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2022, Perpustakaan BPP Bahasa melaksanakan Bedah Buku *Semiotika Dialektis*, karya Nurudin Penerbit UPI Press, yang diterbitkan pada tahun 2020, yang dimeriahkan dengan penampilan musikalisasi puisi Komunitas **Vanderwick**. Kegiatan bedah buku ini di hadiri oleh 75 orang diantaranya dari pegawai BPP Bahasa, mahasiswa, pelajar, akademisi, dan instansi lain.

Hambatan	Rekomendasi
Belum terpenuhinya jumlah SDM Arsiparis khususnya terampil yang melaksanakan Pemberkasan arsip aktif dan penataan arsip inaktif sesuai dengan penghitungan beban kerja (Sumber Daya Manusia di Kearsipan) di Satuan Kerja pada Sekretariat Badan, Pusat-Pusat, Balai/Kantor Bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek	Memberikan kebutuhan pegawai di bidang Kearsipan melalui analisis beban kerja ke Layanan Hukum dan Tata laksana (Sumber Daya Manusia di Kearsipan) di Satuan Kerja pada Sekretariat Badan, Pusat-Pusat, Balai/Kantor Bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek

Hambatan	Rekomendasi
Perlu disusun Anggaran Kearsipan mulai dari Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip aktif, penilaian arsip, usul serah arsip Statis, dan pemusnahan, peningkatan kompetensi, diklat, dan lainnya	Revisi anggaran Anggaran Kearsipan dari Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, fumigasi, penilaian, serah, pemusnahan arsip. Tahun 2023 harus dirancang anggaran terkait kearsipan Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip aktif, penilaian arsip, usul serah arsip Statis, pemusnahan, peningkatan kompetensi, diklat, dan lainnya

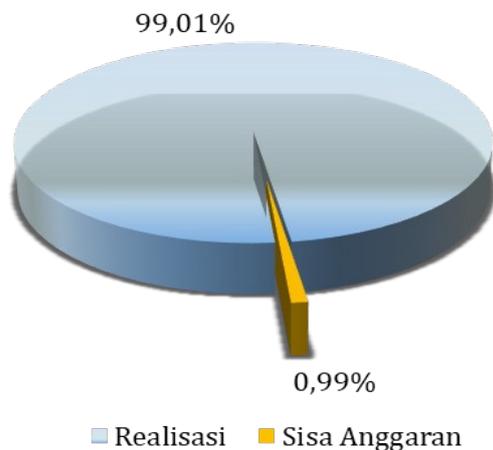
B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

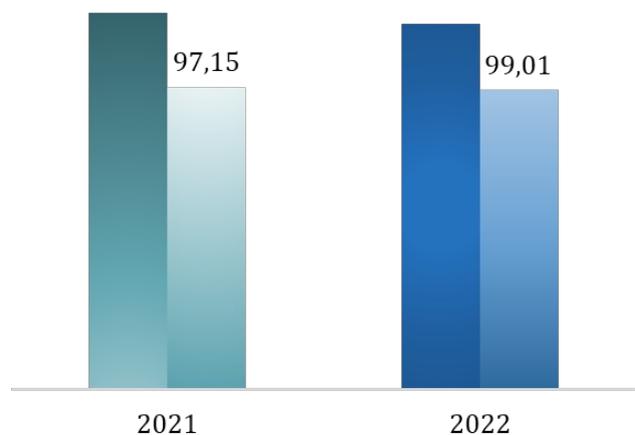
Pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa dalam DIPA awal pada tanggal 17 November tahun 2021 sebesar Rp124.464.400.000,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Sepanjang tahun 2022 terdapat lima kali perubahan pagu anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakan nasional pengalihan anggaran. Berikut rincian perubahan pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa di tahun 2022.

- a. Rp3.433.268.000,00 revisi dilakukan pada tanggal 14 Desember tahun 2021 dengan tujuan untuk pengalihan anggaran ke Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sebesar Rp1.730.812.000,00 dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku sebesar Rp1.702.456.000,00. Sehingga pada tanggal 12 April 2022 ditetapkan pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp123.031.132.000,00.
- b. Rp1.226.200.000,00 revisi anggaran kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022, digunakan sebagai pengalihan anggaran untuk belanja media ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, sehingga ditetapkanlah pagu anggaran per tanggal 14 Juli tahun 2022 sebesar Rp121.804.932.000,00.
- c. Rp20.933.991.000,- revisi ketiga dilaksanakan karena adanya pengalihan belanja pegawai 32 satker di lingkungan BPP Bahasa ke Sekretariat BPP Bahasa sebagai akibat adanya mutasi pegawai dengan jabatan peneliti ke Badan Riset Nasional. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 ditetapkanlah jumlah pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa bertambah menjadi sebesar Rp142.738.923.000,00.
- d. Rp3.227.000.000,- revisi anggaran dilakukan pada tanggal 2 November 2022 dengan tujuan mengalihkan sisa blokir atau *automatic adjustment* (AA) dari Sekretariat BPP Bahasa ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan kegiatan Literasi.
- e. Rp34.989.114.000,00 revisi anggaran terakhir pada tanggal 6 Desember 2022 terkait dengan pengalihan dari Sekretariat BPP Bahasa blokir AA, sehingga pada tanggal 6 Desember 2022 ditetapkan jumlah pagu anggaran sebesar Rp104.522.809.000,00.

Sehingga pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa per bulan Desember ditetapkan sebesar Rp104.522.809.000,00. Dari jumlah pagu anggaran tersebut, Sekretariat BPP Bahasa berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp103.492.522.874,- atau 99,01%. Anggaran tersebut untuk membiayai pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan yaitu, Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Grafik 12. Daya serap Anggaran tahun 2022



Grafik 13. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Realisasi anggaran tahun 2022 jika disandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 1,87%.

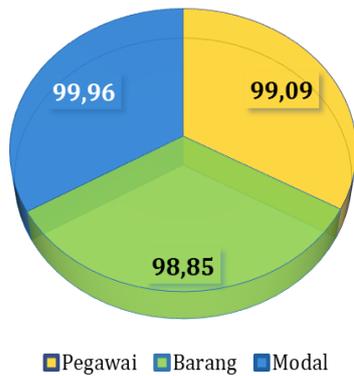
Tabel 6.

Penyerapan Anggaran Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa Per Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	
	Awal	Revisi Akhir	Anggaran	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	28.143.225.000	23.483.758.000	23.213.435.646	98,85
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	98.321.134.000	81.039.051.000	80.279.087.228	99,06

Tabel 7.
Penyerapan Anggaran Per Subkomponen Kegiatan Tahun 2022

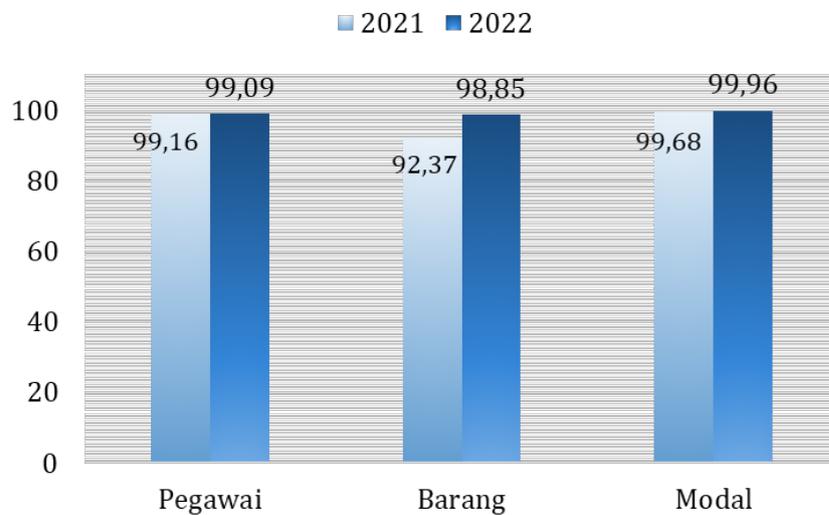
Nama KRO/RO/ Komponen	Fisik		Capaian	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
	Satuan	Target				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				126.464.359.000	104.522.809.000	103.492.522.874
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	2	126.043.022.000	104.101.432.000	103.071.299.174
<i>Layanan Umum</i>	Layanan	1	1	28.143.225.000	23.483.758.000	23.213.435.646
Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Laporan	7	7	1.012.078.000	1.618.359.000	1.598.250.028
Pelayanan Perpustakaan	Laporan	3	3	814.102.000	143.550.000	140.378.500
Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Laporan	12	12	6.432.420.000	3.712.350.000	3.678.628.260
Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Laporan	3	4	889.142.000	1.164.357.000	1.151.534.649
Pelayanan Barang Milik Negara	Laporan	5	6	1.242.978.000	1.193.087.000	1.167.769.758
Pelayanan SDM	Laporan	16	20	9.753.618.000	8.385.707.000	8.354.886.620
Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laporan	11	12	1.267.904.000	1.298.306.000	1.229.527.200
Pelayanan Kehumasan dan Publikasi	Laporan	13	15	4.089.130.000	3.344.596.000	3.301.012.879
Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	12	12	2.641.853.000	2.623.446.000	2.591.447.752
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	97.899.797.000	80.617.674.000	79.857.863.528
Gaji dan Tunjangan	Dokumen	26	26	87.255.179.000	69.973.056.000	69.335.904.988
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan	1	1	10.644.618.000	10.644.618.000	10.521.958.540
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	1	421.337.000	421.377.000	421.223.700
<i>Layanan Sarana Internal</i>	Unit	1	1	421.337.000	421.377.000	421.223.700
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan	1	1	421.337.000	421.377.000	421.223.700



Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Pegawai	69.973.056.000	69.335.904.988
Barang	34.128.376.000	33.735.394.186
Modal	421.377.000	421.223.700
Total	104.522.809.000	103.492.522.874

Grafik 14. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Berikut sandingan realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 per belanja.



Grafik 15. Realisasi anggaran per belanja Tahun 2021 dan 2022

2. Efisiensi Anggaran

Sekretariat BPP Bahasa melakukan efisiensi anggaran sebanyak tiga kali yang disebabkan oleh kebijakan. Sehingga hal ini mempengaruhi terjadinya revisi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022. Berikut rincian efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa.

- Efisiensi anggaran pengalihan belanja media dari Sekretariat BPP Bahasa ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) sebesar Rp1.226.200.000,00.
- Efisiensi anggaran dari belanja pegawai yang berstatus *automatic adjustment* (AA) dari Sekretariat BPP Bahasa dikembalikan ke BA BUN sebesar Rp3.227.000.000,00.
- Efisiensi anggaran pengalihan belanja pegawai sebagai akibat dari mutasi pegawai BPP Bahasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp34.989.114.000,00.

Efisiensi juga dilakukan dalam rangka optimalisasi sisa anggaran per komponen untuk dialokasikan menjadi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja. Sehingga capaian fisik per komponen dapat melebihi dari 100%. Berikut optimalisasi anggaran per subkomponen di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa.

Tabel 8.
Hasil Optimalisasi Kegiatan Per Subkomponen Tahun 2022

Nama KRO/RO/Komponen	Sasaran			Keterangan
	Satuan	Target	Capaian	
Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Laporan	3	4	Terdapat sisa anggaran yang dioptimalkan untuk pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan Pihak Eksternal
Pelayanan Barang Milik Negara	Laporan	5	6	Terdapat sisa anggaran yang dioptimalkan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara di bulan Desember
Pelayanan SDM	Laporan	16	20	Layanan Kepegawaian memiliki sisa anggaran yang dioptimalkan untuk pelaksanaan percepatan inpassing Widyabasa dan Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2022. Di triwulan IV terdapat pengalihan sisa anggaran dari layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (APK) sebesar Rp51.671.000,- untuk pelaksanaan: 1. Peningkatan Kompetensi Anggota KKLK 2. Peningkatan kompetensi kepala satker di lingkungan BPP Bahasa melalui <i>public speaking</i> .
Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laporan	11	12	Terdapat sisa anggaran yang dioptimalkan untuk pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Ketatalaksanaan
Pelayanan Kehumasan dan Publikasi	Laporan	13	15	1. penulisan artikel laman dan pengelolaan laman 2. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) identifikasi kebutuhan informasi pengembangan website kemdikbud.go.id

Efisiensi selanjutnya terdapat di capaian indikator kinerja Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dengan target 5 (lima) satker dan terealisasi sebanyak 9 satker atau sebesar 180% dan realisasi anggaran sebesar 99,06%.

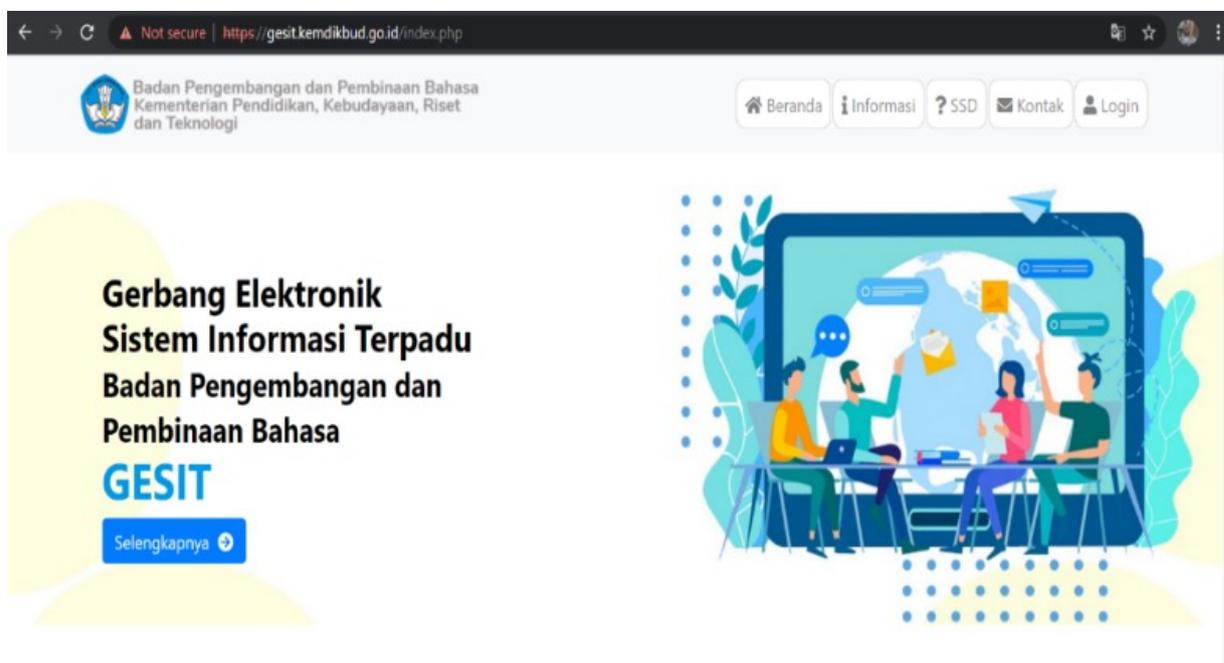


INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING COLLABORATIVE



INOVASI

1. Pengembangan Laman GESIT



Gambar 64. Laman Gesit dapat diakses melalui alamat gesit.kemdikbud.go.id.

Gesit didasarkan pada perlunya kebutuhan keterbukaan proses manajemen administrasi di bidang layanan kepegawaian yang selama ini banyak permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kolaborasi yang dilakukan oleh tim layanan kepegawaian dengan tim layanan infrastruktur jaringan, data, dan sistem informasi telah menciptakan aplikasi layanan daring yang terpadu.

Aplikasi Gesit ini diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Bahasa.

Di tahun 2022, pengembangan GESIT fokus kepada pengembangan fitur menu penilaian

pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pemberkasan widyabasa.

1. Fitur Penilaian pegawai

Fitur layanan penilaian pegawai di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berhasil dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan syarat pencapaian Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) serta Laporan Kinerja Pegawai (Lakip) Satuan Kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Bahasa.

2. Fitur Kenaikan Pangkat

Fitur layanan sistem informasi kenaikan pangkat sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa yang dikelola oleh Layanan Kepegawaian di Sekretariat Badan Bahasa.

3. Fitur Kenaikan Gaji Berkala.

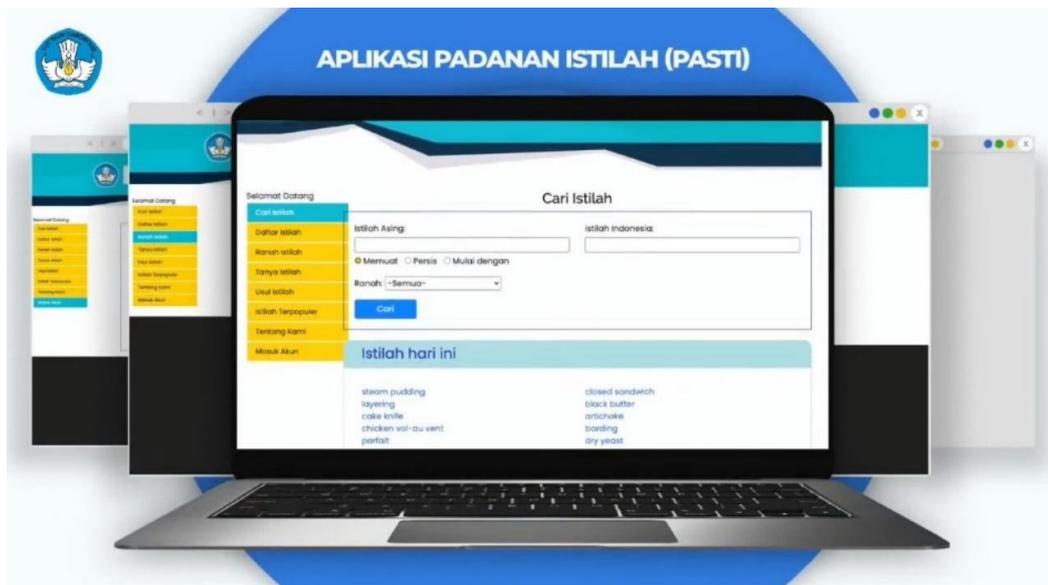
Fitur layanan sistem informasi kenaikan gaji berkala sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa yang dikelola oleh Layanan Kepegawaian di Sekretariat Badan Bahasa.

4. Fitur Pemberkasan widyabasa

Fitur layanan sistem informasi registrasi Widyabasa sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa yang dikelola oleh Layanan Kepegawaian di Sekretariat Badan Bahasa.

2. Pengembangan Laman PASTI (Padanan Istilah)

PASTI merupakan salah satu Penerapan Sistem Informasi Layanan Padanan Istilah secara Daring yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu cara untuk menyebarluaskan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing yang telah dipadankan dalam bahasa Indonesia. Aplikasi PASTI merupakan gabungan dari dua buah aplikasi daring yang sebelumnya sudah digunakan oleh masyarakat, yaitu aplikasi Glosarium daring dan SPAI (Senarai Padanan Asing Indonesia). Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dengan membuka versi daring dengan alamat pasti.kemdikbud.go.id.



Gambar 65. Laman Aplikasi Padanan Istilah (PASTI)

Dalam aplikasi ini ada enam menu utama yang dapat digunakan untuk mencari padanan istilah, melihat daftar seluruh padanan berdasarkan abjad, mencari berdasarkan ranahnya, bertanya, mengusulkan, dan melihat daftar istilah terpopuler. Aplikasi PASTI untuk versi android masih dalam pengembangan, sementara ini masyarakat tetap dapat menggunakan aplikasi SPAI dengan cara mengunduh pada playstore untuk versi android. Saat ini aplikasi Pasti memuat 64.334 padanan. Peluncuran aplikasi PASTI secara resmi dilaksanakan pada saat Puncak Acara Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022.

3. Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah disusun data statistik kebahasaan dan kesastraan oleh BPP Bahasa bekerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam bentuk



Gambar 66. Buku Data Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2022

buku. Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan tersebut dibagi menjadi empat subbab sesuai jumlah entitas dalam Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan (Dapopas), yaitu (1) Obyek Kebahasaan dan Kesastraan; (2) Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan; (3) Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan; dan (4) Substansi Kebahasaan dan Kesastraan.



3) Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan berisi data terkait dengan:

- a) Jumlah SDM di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- b) Jumlah Penyuluh Berdasarkan Unit Kerja;
- c) Jumlah Peneliti Bahasa Berdasarkan Unit Kerja;
- d) Jumlah Pengkaji Bahasa Berdasarkan Unit Kerja;
- e) Jumlah Penerjemah Bahasa Berdasarkan Unit Kerja;
- f) Jumlah Analisis Kata dan Istilah Berdasarkan Unit Kerja;
- g) Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; dan
- h) Jumlah Penugasan Guru Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing ke Luar Negeri.





PENGHARGAAN

1. Penghargaan Zero Retur SP2D Non UP



Sekretariat BPP Bahasa menerima penghargaan Zero Retur SP2D Non UP yang diberikan oleh DJPb Kemenkeu, pada tanggal 31 Januari 2022 secara langsung oleh Kepala KPPN Jakarta III atas penilaian *zero retur* di tahun 2021. Retur SP2D sendiri adalah penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim. Indikator kinerja Retur dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang SP2D Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Penghargaan IDEAS 2022 Kategori Kebijakan Isu Sosial Melalui Program Komunikasi Revitalisasi Bahasa Daerah dari Humas Indonesia



Gambar 67. Foto Penyerahan Penghargaan IDEAS Tahun 2022



Program Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah Meraih Penghargaan Kategori Kebijakan Sosial

IDEAS yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA memberikan penghargaan kepada organisasi, korporasi, atau individu yang memiliki praktik baik dalam kebijakan yang mengutamakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (*diversity, equity, and inclusion (DEI)*), serta lingkungan, sosial, dan pemerintahan (*environmental, social, and governance (ESG)*).

"...kriteria utama dalam meraih penghargaan kategori kebijakan sosial adalah adanya strategi komunikasi yang sistematis dan terukur, karena program yang dijalankan berhubungan dengan masyarakat luas"

HUMAS Indonesia

Gambar 68. Piala Penghargaan IDEAS Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2022

Penghargaan IDEAS 2022 kategori Kebijakan Isu Sosial melalui program komunikasi Revitalisasi Bahasa Daerah dari Humas Indonesia diterima langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz, pada Jumat, 5 Agustus 2022 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Revitalisasi bahasa daerah merupakan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Revitalisasi bahasa daerah dilaksanakan oleh BPP Bahasa karena dari 718 bahasa daerah di Indonesia sebagian besar kondisinya terancam punah dan kritis.

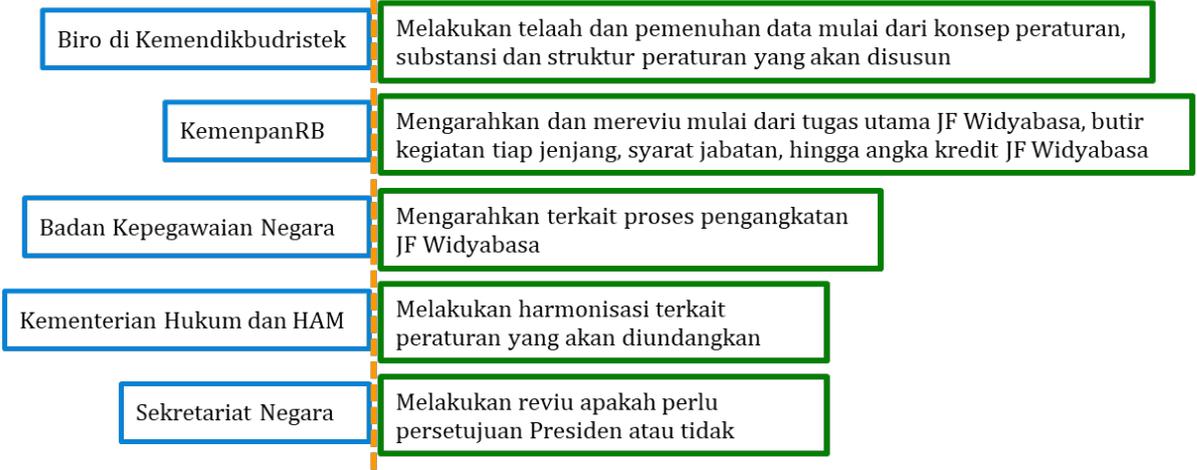


PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

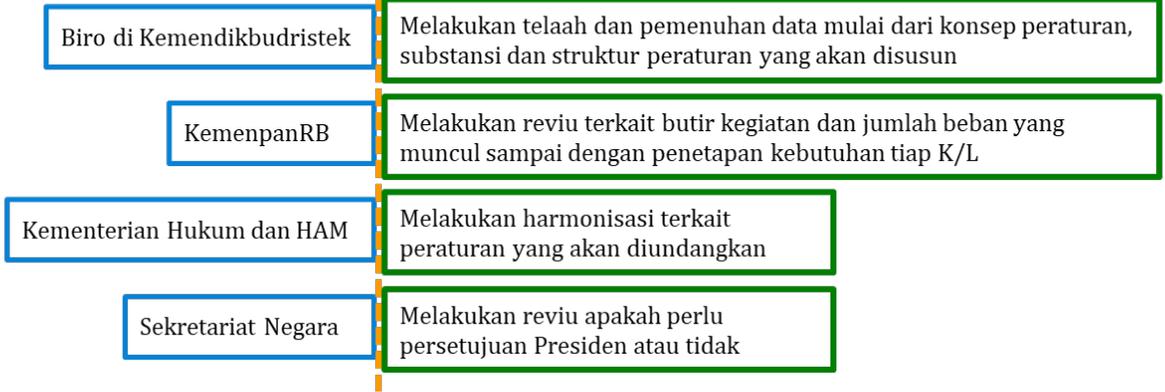
Pada tahun 2022, Sekretariat BPP Bahasa melakukan program *crosscutting/collaborative* berupa pengadaan Jabatan Fungsional Tertentu Widyabasa. Penyusunan naskah akademik Widyabasa dilakukan oleh BPP Bahasa dan Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek, dengan mitra pendamping dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Sekretariat Negara (Setneg). Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki peran dalam melakukan harmonisasi, validator, revidi, telaah sampai dengan melakukan pengesahan peraturan yang dibutuhkan.

Berikut merupakan peranan kementerian dan lembaga saat berkolaborasi dalam menyusun sejumlah peraturan terkait dengan pengadaan JFT Widyabasa.

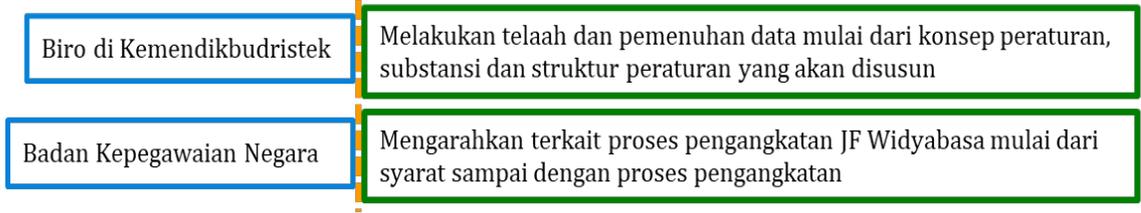
PermenpanRB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa



Permendikbudristek Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa



Keputusan Kepala Badan Nomor 0509/I.I1/HK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa Melalui Penyesuaian



Dampak dari kolaborasi ini adalah tersusunnya jabatan fungsional pertama yang di bidang kebahasaan dan kesastraan serta peraturan terkait yang menjadi dasar hukum dibentuknya jabatan fungsional widyabasa.

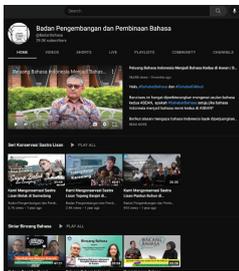


Media Sosial Sekretariat BPP Bahasa

Konten media sosial Badan Bahasa banyak diambil dari produk-produk Badan Bahasa seperti KBBI, UKBI, BIPA, Buku Cerita Rakyat, Bahasa Daerah/ Lab Kebinekaaan, Kutipan para tokoh kebahasaan dan Kesastraan, isu-isu terkini terkait dengan kebahasaan dan kesastraan, dari kegiatan-kegiatan BPP Bahasa, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini, Sekretariat BPP Bahasa dalam melakukan publikasi terkait informasi kebahasaan dan kesastraan tersebut menggunakan berbagai jenis media sosial, sebagai berikut.



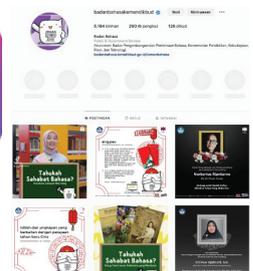
Pengikut : 29.200
Jumlah Konten : 119



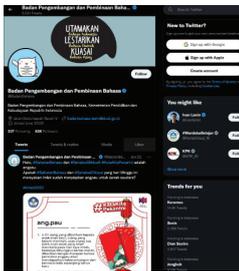
Pengikut : 76.000
Jumlah Konten : 115



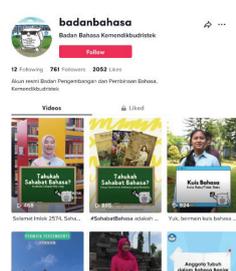
Pengikut : 26.567
Jumlah Konten : 214



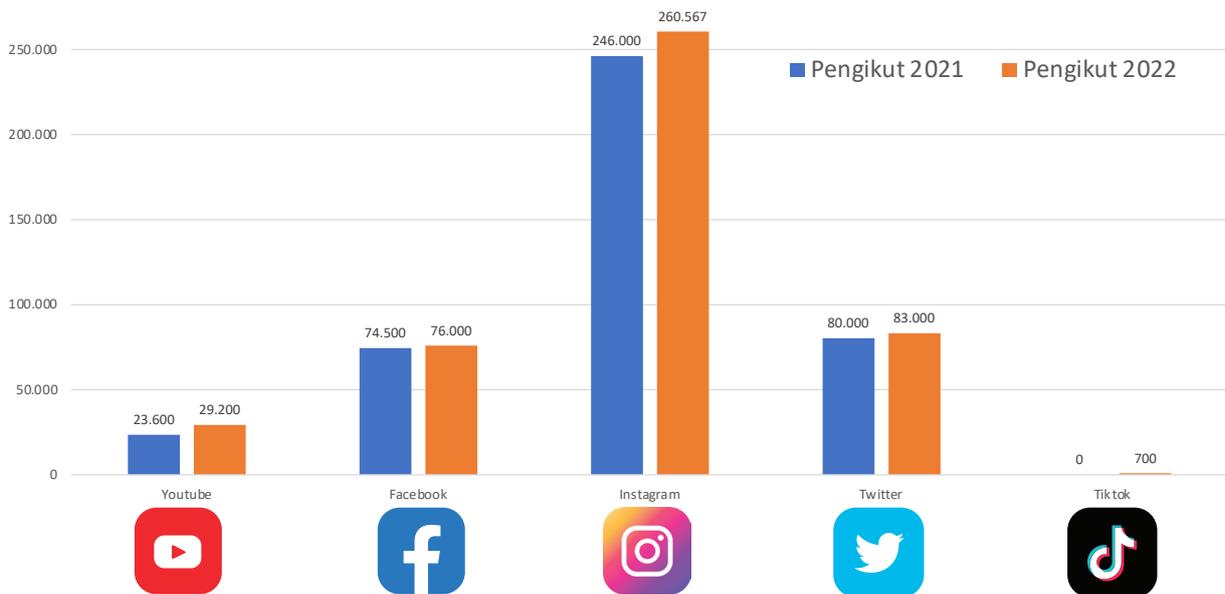
Pengikut : 83.200
Jumlah Konten : 152



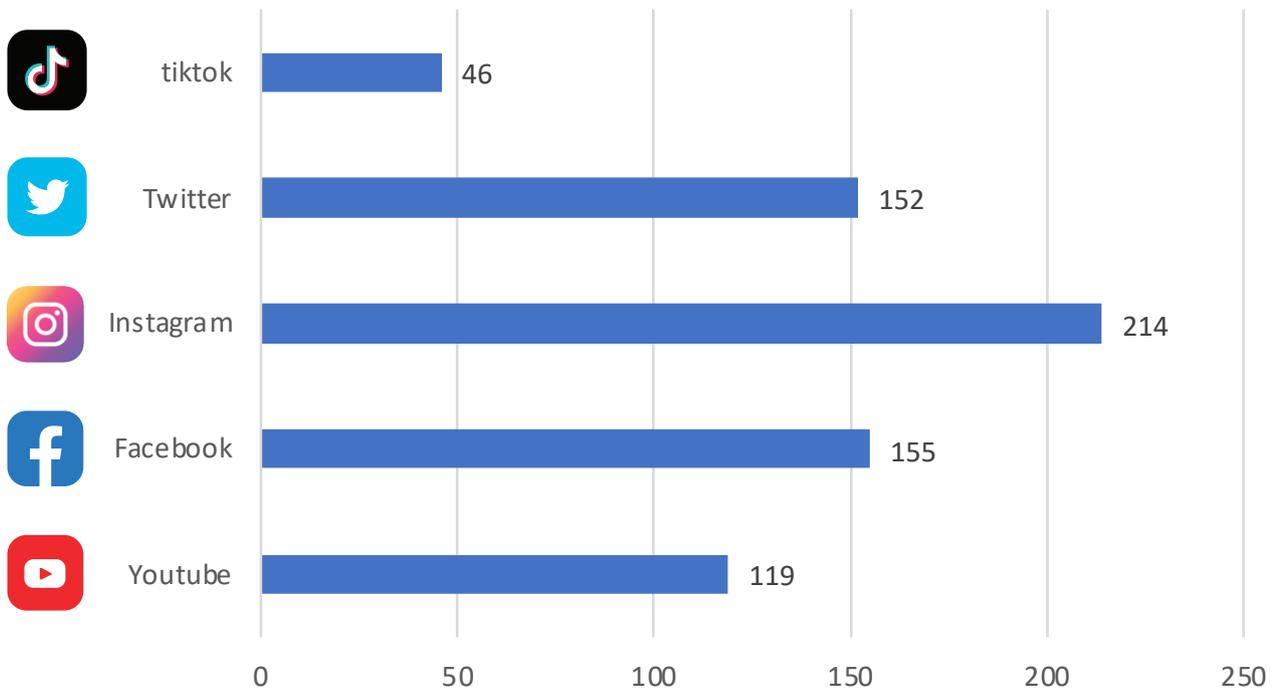
Pengikut : 700
Jumlah Konten : 152



- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- badanbahasakemendikbud
- @BadanBahasa
- @badanbahasa



Grafik 16. Jumlah pengikut akun sosial media Badan Bahasa Tahun 2021 dan 2022



Grafik 17. Konten Media Sosial BPP Bahasa Tahun 2022



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Beranda Tentang Kami Informasi Layanan Produk Galeri PPID

Masukkan kata kunci **Cari**

Spirit Pusbanglin Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan Gerakan Literasi Nasional Laboratorium Kebinekaan Peta Bahasa Aplikasi Sipebi

Berita Terbaru

- Pelantikan Pejabat
- Tujuh Program dan
- Kolaborasi
- Badan Pengembangan

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari ini: 75

Minggu ini: 4.544

Bulan ini: 18.388

Tahun ini: 1.014.047



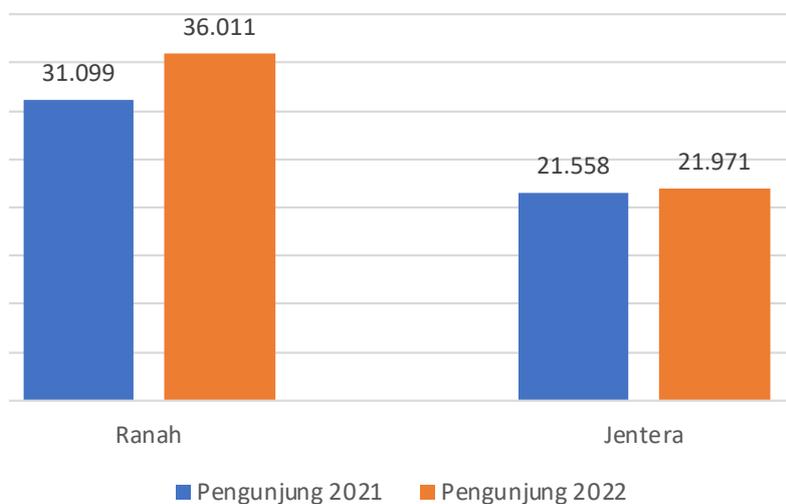
Jurnal Jentera dan Ranah



Jentera menerbitkan artikel penelitian (studi sastra dan penelitian lapangan), gagasan konseptual, penelitian, pragmatik teori, dan resensi buku. Jentera menerbitkannya dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Setiap artikel yang dikirimkan ke JENTERA tidak akan dikenakan biaya pemrosesan artikel dan biaya pengiriman artikel.



Ranah adalah jurnal penelitian yang menerbitkan berbagai laporan penelitian, studi literatur dan tulisan ilmiah tentang fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, pragmatik, antropinguistik, bahasa dan budaya, dialektologi, dokumentasi bahasa, linguistik forensik, linguistik sejarah komparatif, linguistik kognitif, linguistik komputasi, linguistik korpus, neurolinguistik, pendidikan bahasa, penerjemahan, perencanaan bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan bidang ilmiah lain yang terkait dengan studi bahasa.



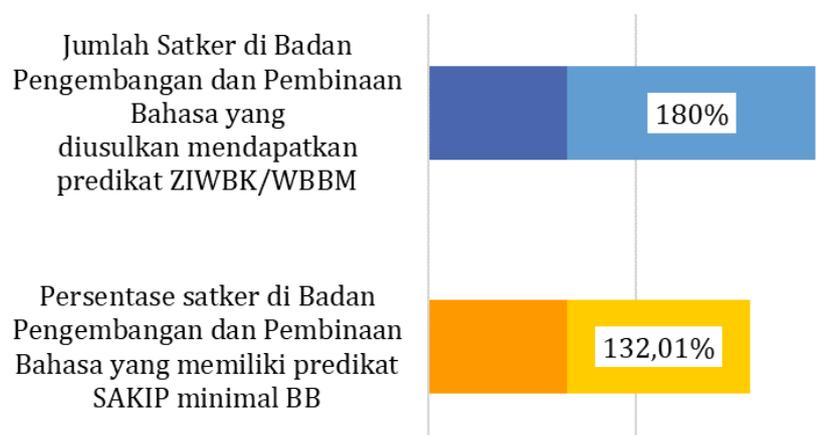
Grafik 18. Jumlah pengunjung majalah Jentera dan Ranah tahun 2021 dan 2022

BAB IV

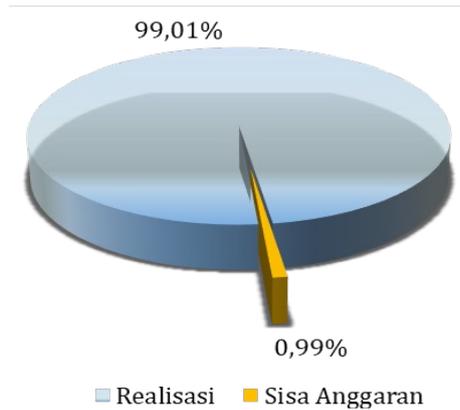
PENUTUP

Capaian Kinerja yang berhasil dicapai oleh Sekretariat BPP Bahasa yaitu indikator kinerja Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM. Kedua indikator kinerja tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022. Pencapaian kedua indikator tersebut tersebut adalah untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan tahun 2022.

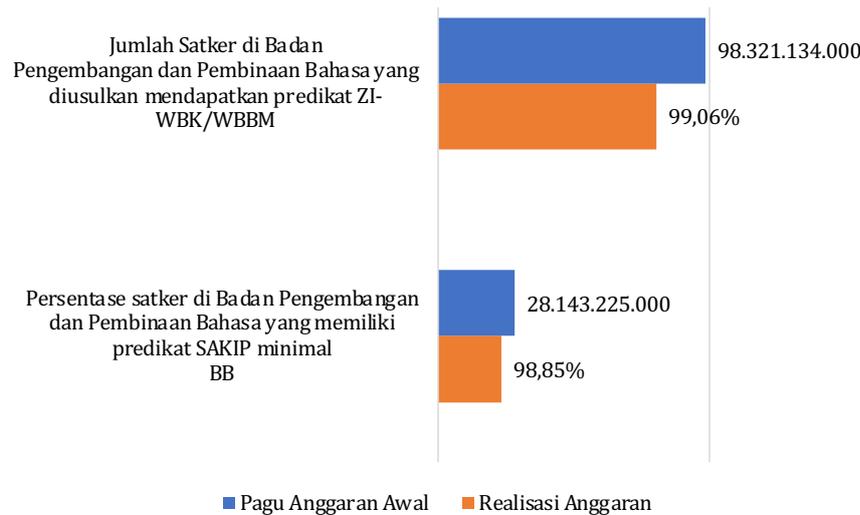
1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB tercapai 100% dari target 75,75%, atau sebesar 132,01%.
2. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM tercapai sebanyak 9 satker dari target 5 satker atau sebesar 180%.



Grafik 19. Grafik Capaian IKK Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2022



Grafik 20. Daya serap Anggaran tahun 2022



Grafik 21. Realisasi Anggaran per IKK Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat BPP Bahasa pada tahun 2022 adalah

1. satker dalam memenuhi syarat minimal untuk diusulkan menjadi satker ZI-WBK/WBBM belum optimal;
2. belum tersedianya pemetaan kompetensi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), dan pemerataan peningkatan kompetensi mutu SDM;
3. sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar barang standar kebutuhan belum lengkap; dan
4. seluruh aplikasi dengan petunjuk teknis penggunaan untuk dapat dijadikan acuan seluruh satuan kerja dan pemangku kepentingan belum lengkap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretariat BPP Bahasa perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. melakukan pendampingan pada setiap satker dan mengoptimalkan peran asesor RBI dan pemanfaatan aplikasi SIAZIK;
2. menyusun peta kompetensi untuk peningkatan mutu SDM, dan menyediakan program dan anggaran untuk meningkatkan mutu SDM;
3. melengkapi sarana dan prasarana serta pedoman pengelolaan sarana dan prasarana; dan
4. menyusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi sebagai acuan seluruh satuan kerja dan pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja Akhir

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Surat Pernyataan Reviu Lakin

SK Tim Lakin Sekretariat Badan

SK Tim Reviu Lakin Sekretariat Badan



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Muksin

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Maret 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



E. Aminudin Aziz



Hafidz Muksin

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	75.75
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 126.464.400.000
		TOTAL	Rp. 126.464.400.000

Jakarta,30 Maret 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



E. Aminudin Aziz

**Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



Hafidz Muksin



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Muksin

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz



Hafidz Muksin

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	75.75
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 104.522.809.000
		TOTAL	Rp. 104.522.809.000

Jakarta, 29 Desember 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



Hafidz Muksin



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	75.75	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 75.75	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 100	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I, progres pencapaian target IKK Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, Sekretariat Badan Bahasa baru melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian nilai SAKIP, diantaranya - Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja - Sosialisasi Perjanjian Kinerja - Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja bulanan dan triwulanan - Pendampingan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa - Penyelarasan Rencana Strategis 2020—2024</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala hambatan pada pencapaian kinerja pada triwulan I adalah pada sistem informasi pelaporan tahun 2022 yang terlambat diluncurkan sehingga pada proses penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi, pelaporan triwulan I, dan proses pemantauan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja terkendala/terlambat.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja dengan menggunakan instrument manual - Koordinasi/konsultasi dengan lembaga/instansi terkait untuk menanyakan perkembangan penggunaan aplikasi tahun 2022 - Melakukan pendampingan langsung dengan petugas pelaporan satuan kerja</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian IKK Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB pada Triwulan II adalah nol, dari target nol yang ditetapkan. Namun dalam progres tersebut, Sekretariat BPP Bahasa telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKK tersebut, yaitu Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan melaksanakan Penyusunan RKT, PK, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, dan Revisi Renstra 2020--2024. Sekretariat BPP Bahasa juga telah melakukan pendampingan awal persiapan penilaian SAKIP Tahun 2022 ke satker di lingkungan BPP Bahasa, sehingga menghasilkan rekomendasi dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi dalam menghadapi penilaian SAKIP Tahun 2022. Sehingga sampai dengan triwulan II secara persentase progres capaian IKK yaitu sebesar 40%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target IKK di TW II, yaitu 1. Adanya perubahan penilaian sesuai PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 sehingga membutuhkan penyesuaian dalam penyiapan dokumen yang diperlukan dalam penilaian. 2. Terbatasnya waktu yang diberikan untuk menyiapkan dokumen data dukung SAKIP dengan kesiapan KKE yang masih terus disusun.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa dalam mengatasi kendala/hambatan yang ada, yaitu 1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait dengan format penilaian dan KKE terbaru, serta melakukan pendampingan awal ke seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa untuk memastikan kesiapan dokumen pendukung SAKIP. 2. Melakukan percepatan penyiapan dokumen data dukung SAKIP dan koordinasi ke Biro Perencanaan terkait dokumen-dokumen yang wajib disiapkan melalui KKE terbaru.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Capaian IKK Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB pada Triwulan III adalah nol, dari target nol yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPP Bahasa dalam mendukung pencapaian target IKK di triwulan III, yaitu telah melakukan pendampingan ke seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa untuk melakukan penyiapan data dukung dokumen SAKIP Tahun 2022. Selain itu, pada tanggal 13--15 Juli 2022, melalui Biro Perencanaan, telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Dokumen Data Dukung SAKIP Tahun 2022 seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa. Pelaksanaan penilaian mandiri dilaksanakan dengan metode pembagian kelompok sesuai dengan kelompok pendampingan satuan kerja. Hasil pendampingan tersebut, dihasilkan nilai total persentase rerata sebesar 105.35%. Rekomendasi dari hasil kegiatan pendampingan penilaian mandiri, satker diminta melakukan perbaikan atas catatan atau rekomendasi pendamping dari Biro Perencanaan dan dapat mengunggah kembali dokumen SAKIP ke aplikasi Spasikita dan berkoordinasi dengan layanan evaluasi Sekretariat BPP Bahasa. Setelah itu, seluruh tim melakukan koordinasi untuk menginventarisasi kembali hasil rekomendasi seluruh pendamping kelompok dari Biro Perencanaan. Langkah selanjutnya, Layanan evaluasi Setban PP Bahasa kembali melakukan pendampingan secara daring ke 31 balai/kantor, dan 9 balai/kantor secara bersemuka. Saat ini balai/kantor menunggu proses penilaian yang sudah dimulai oleh Inspektorat Jenderal per tanggal 28 September 2022.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala/permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian target IKK di triwulan III, yaitu 1. Satker tidak langsung menindaklanjuti hasil catatan evaluasi. 2. Terdapat beberapa dokumen atau data dukung yang belum lengkap atau belum ada. 3. Perspektif pendamping terkait kertas kerja evaluasi sesuai dengan permenpan 88 tahun 2021 masih berbeda sehingga menyulitkan untuk memahami kebutuhan data dukung agar memenuhi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan. 4. Belum seluruh kepala satker memahami dan berkomitmen untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker masing-masing.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi/tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa dalam mengatasi masalah/kendala, yaitu 1. Melakukan sosialisasi permenpan nomor 88 Tahun 2021 tentang Penilaian SAKIP. 2. Melakukan pemantauan dan pendampingan kesiapan satker dalam menghadapi penilaian SAKIP. 3. Menyampaikan saran kepada tim pendamping dari Biro Perencanaan agar tim penilai memiliki standar penilaian yang sama. 4. Mengingatkan seluruh kepala satker agar memiliki komitmen dalam pelaksanaan SAKIP.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Capaian IKK Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal BB pada Triwulan IV adalah 100% dari target 75,75 (33 satker tercapai dari target 26 satker), yang tercantum pada PK 2022. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seluruh satuan kerja memperoleh predikat A. Peningkatan nilai SAKIP di tahun 2022 seluruh satker tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa dan dukungan dari semua pihak, mulai dari pimpinan, staf, dan petugas pelaporan yang dilakukan mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala/permasalahan yang dihadapi pada triwulan IV, yaitu Belum semua pegawai di lingkungan BPP Bahasa memiliki pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa, yaitu Sekretariat BPP Bahasa melakukan sosialisasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke seluruh pegawai di lingkungan BPP Bahasa.</p>
---	---	--	---	-------	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[SK 1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 9 TW4 : 9	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Berkoordinasi dengan tim RBI dan ZI WBK/WBBM di BPP Bahasa, untuk melakukan pendampingan, yaitu satker LBP Lampung, NTB, Sultra, Kalteng, Bali dan Jatim. Persentase progress pelaksanaan pendampingan sebesar 25%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Masih belum berjalannya monitoring evaluasi secara berkala dan tindaklanjut monev pada setiap area perubahan - Peran agen perubahan belum maksimal - Belum ada inovasi yang nyata - Kelengkapan data dukung ZI-WBK</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Pembangunan pola pikir semua pegawai terkait target dan ukuran keberhasilan - Pembangunan komitmen antara pimpinan dan staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran - Menentukan target budaya kerja dan pola pikir apa yang akan diusung dan ditentukan mekanismenya - Komitmen Bersama seluruh pegawai untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala - Meningkatkan peran pimpinan sebagai penggerak seluruh pegawai dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan pada tiap area perubahan - Perlu adanya komitmen Bersama antara pimpinan, tim RBI, dan seluruh pegawai, untuk melaksanakan tiap rencana kerja pada tiap area perubahan dan medokumentasikan dengan baik</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada bulan April-Mei, Sekretariat BPP Bahasa melalui tim Asesor dan RBI melakukan upaya melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZI-WBK, dengan tujuan untuk mereview kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Dari total sembilan satker yang diajukan untuk menjadi satker ZI-WBK, yang lolos sampai dengan triwulan II yaitu BBP Bali, BBP Jawa Timur, BBP Kalimantan Tengah, dan KBP Nusa Tenggara Barat. Pendampingan sampai dengan tahap seleksi yang telah dilakukan tim asesor dan RBI sampai dengan triwulan II telah mencapai progress 50%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Kurangnya SDM yang kompeten dalam melakukan pembinaan tentang ZI-WBK/WBBM 2. Komitmen seluruh pegawai di lingkungan BPP Bahasa terkait dengan ZI-WBK/WBBM masih kurang. Hal ini karena belum seluruh lapisan pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang ZI-WBK/WBBM.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pembinaan terhadap SDM/tim RBI tentang wawasan ZI-WBK/WBBM. 2. Meningkatkan komitmen satuan kerja agar dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik, dan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan pegawai agar memiliki pemahaman sama tentang ZI-WBK/WBBM.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada bulan April-Mei, Sekretariat BPP Bahasa melalui tim Asesor dan RBI melakukan upaya melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZIWBK, dengan tujuan untuk mereview kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Dari total sembilan satker yang diajukan untuk menjadi satker ZI-WBK, yang lolos sampai dengan triwulan III yaitu BBP Bali, BBP Jawa Timur, BBP Kalimantan Tengah, dan KBP Nusa Tenggara Barat. Untuk tahap selanjutnya proses penilaian ZI-WBK Tahun 2022 yaitu pelaksanaan survei oleh K/L yang terkait dengan pelaksanaan anti korupsi maupun pelayanan publik dalam hal ini Ombudsman dan KPK yang akan melaksanakan survei tersebut. Beriringan dengan survei tersebut juga akan dilaksanakan penilaian dari tim asesor KemenpanRB untuk memvalidasi kelengkapan dokumen pelaksanaan ZI-WBK di empat satker yang diusulkan yang direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan September. Untuk satker yang dinilai oleh TPI Kemendikbudristek telah dilaksanakan penilaian pada bulan Agustus. Sekretariat Badan selaku penanggungjawab pada tahap ini telah melakukan pendampingan penyusunan salindia agar setiap satker yang akan melaksanakan penilaian dapat menginformasikan sesuai dengan substansi yang ada pada Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK. Selain itu supaya inovasi serta layanan yang ada pada tiap satker lebih diangkat untuk menunjukkan perubahan yang telah dilakukan oleh tiap satker calon ZI-WBK.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Sarana dan prasarana pada tiap satker masih belum rata sesuai dengan spesifikasi satker yang diajukan ZI WBK.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Dilakukan upaya agar satker dapat fokus ke inovasi serta layanan yang ada untuk lebih diangkat untuk menunjukkan perubahan yang telah dilakukan oleh tiap satker calon ZI-WBK. Sehingga dalam hal ini dilakukan pendampingan penyusunan salindia dan memberikan pengetahuan/wawasan praktik baik ke satker yang sudah memiliki predikat ZI WBK.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Berdasarkan kriteria minimal untuk dicalonkan menjadi satuan kerja berpredikat ZI-WBK, yaitu nilai minimal SAKIP B, tindaklanjut temuan 100%, dan telah 100% pegawai melaporkan LHKPN dan LHKASN, maka didapatkanlah satu satuan kerja calon ZI-WBBM yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, serta delapan satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM yaitu: 1) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta, 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 4) Balai Bahasa Provinsi Bali, 5) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, 6) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, 7) Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan 8) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian diusulkan ke pada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Instansi (TPI) di lingkungan Kemendikbudristek dengan surat Nomor 0913/I1/OT.01.03/2022 tanggal 25 maret 2022.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum adanya keberlangsungan kegiatan terkait ZI-WBK pada tiap unit kerja, sehingga jumlah satker yang mengajukan diri sebagai calon ZI-WBK/WBBM kurang optimal.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendampingan dan monitoring pada tiap unit kerja secara masif dan komprehensif.</p>
---	---	--	--------	---	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Layanan Umum	1.0000	Layanan	1	1	1	1	Rp. 23.483.758.000
2	[051] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan			2	6	7	7	Rp. 1.548.116.000
3	[052] Pelayanan Perpustakaan			0	1	3	3	Rp. 154.160.000
4	[053] Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			2	5	7	12	Rp. 3.687.240.000
5	[054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			2	3	3	4	Rp. 1.223.768.000
6	[055] Pelayanan Barang Milik Negara			0	2	4	6	Rp. 1.221.158.000
7	[056] Pelayanan SDM			5	14	17	20	Rp. 8.302.771.000
8	[057] Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			0	6	9	12	Rp. 1.339.088.000
9	[058] Pelayanan Kehumasan dan Publikasi			2	6	9	15	Rp. 3.350.850.000
10	[059] Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal			2	6	10	12	Rp. 2.656.607.000
11	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0	1	1	1	Rp. 80.617.674.000
12	[001] Gaji dan Tunjangan			5	13	19	26	Rp. 69.973.056.000
13	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	1	1	1	Rp. 10.644.618.000
14	Layanan Sarana Internal	1.0000	Unit	1	1	1	1	Rp. 421.377.000
15	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1	1	1	1	Rp. 421.377.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 104.522.809.000

Jakarta,11 Januari 2023

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



Hafidz Muksin

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 13 Januari 2023

Ketua Tim Reviu

Margiyati

196706091990012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330

Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0326/I1/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- b. menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;

- c. menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- d. merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- e. menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- f. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- g. memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS BADAN,



HAPIDZ MUKSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
NOMOR 0326/I1/PR.06.00/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAKIP
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat BPP Bahasa	Ketua Tim
3.	Ratna Perwitosari	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
4.	Yessy Rosalina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
5.	Oka Wahyu Setia A.	Analisis Jabatan	Anggota
6.	Sunardi	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
7.	Nova ardryansyah	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota

8.	Akhmad Susanto	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
9.	Dede Saputra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10.	Ferry Cahyadi	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
11.	Meryna Afrila	Analisis Kerja Sama	Anggota
12.	Danang Harry Wibowo	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
13.	Uud Suyuhuddin	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
14.	Dinar Kartika Apriliani W.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
15.	Yiying Yuningsih	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
16.	Nurjaman	Penyusun Informasi dan Publikasi	Anggota

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0327/I1/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 berkualitas; dan

- b. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
NOMOR 0327/I1/PR.06.00/2023
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

TIM REVIU LAKIP

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Margiyati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Ketua Tim
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
3.	Yessy Rosalina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4.	Tri Indira Satya Pancawardhana	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5.	Oka Wahyu Setiya Adi	Analisis Jabatan	Anggota

SEKRETARIS BADAN,


HAFIDZ MUKSIN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat**

